

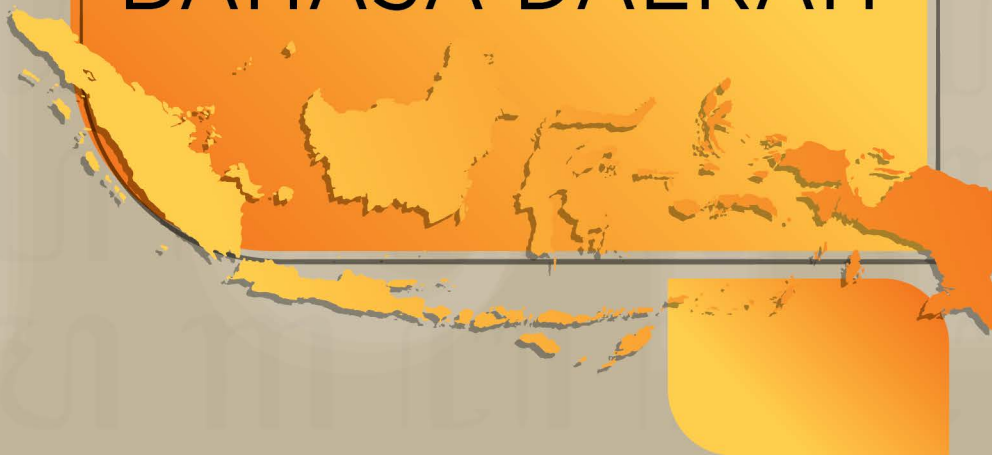


MODEL

B

PEDOMAN

MODEL REVITALISASI BAHASA DAERAH





MODEL

B

PEDOMAN

MODEL REVITALISASI BAHASA DAERAH



Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

2022

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PEDOMAN REVITALISASI BAHASA DAERAH MODEL B

PEDOMAN REVITALISASI BAHASA DAERAH MODEL B

Pengarah

E. Aminuddin Aziz
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Penanggung Jawab

Imam Budi Utomo
Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Penyusun

Katharina Endriati Sukamto dan Imam Qalyubi

Pembantu Penyusun

Mardi Nugroho, Dwi Agus Erinita, dan Miranti Sudarmaji

Penyelaras

Ganjar Harimansyah dan Anita Astriawati Ningrum

Pendesain dan Pengatak

Nurjaman

Ukuran: 14x20 cm

ISBN :

No ISBN

Cetakan Pertama :

Juni 2022

Hak Cipta ©2022 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

SAMBUTAN

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Indonesia merupakan negara kedua setelah Papua Nugini yang kaya dengan bahasa daerah. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Bagi bangsa Indonesia, bahasa daerah sesungguhnya merupakan aset. Ia merupakan salah satu kekayaan kultural bangsa Indonesia yang berbineka. Kelahiran bangsa Indonesia tidak terlepas dari keberagaman budaya yang ada di dalamnya, termasuk bahasa-bahasa setiap suku bangsa dan kelompok masyarakat tutur yang lebih kecil.

Merawat dan memperlakukan aset takbenda seperti bahasa daerah tentu saja berbeda dengan cara melihat aset berupa benda. Bahasa daerah merekam kearifan lokal, khazanah pengetahuan dan kebudayaan, serta kekayaan batin penuturnya. Kepunahan bahasa daerah sama artinya dengan hilangnya aset-aset takbenda yang terekam di dalam bahasa daerah tersebut.

Lebih dari tiga perempat bahasa daerah terdapat di wilayah timur Indonesia, dengan jumlah penutur yang rata-rata sedikit. Akibatnya, ancaman kepunahan bahasa-bahasa daerah seperti ini menjadi sangat kuat. Situasinya akan makin parah kalau tidak ada keberpihakan dari penuturnya dan dari pemerintah daerah setempat. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengembangan dan perlindungan bahasa, sastra, dan aksara daerah adalah tanggung jawab pemerintah daerah.

Paling sedikit, ada empat faktor penyebab kemunduran atau bahkan kepunahan bahasa daerah. Pertama, sikap penutur bahasa daerah terhadap bahasanya. Kedua, migrasi atau mobilitas sosial yang tinggi. Ketiga, adanya perkawinan dengan pasangan yang berbeda bahasa. Keempat, bencana atau musibah yang menyebabkan berkurangnya penutur bahasa daerah. Dari keempat faktor itu, sikap penutur bahasa kepada bahasa daerahnya menjadi penyumbang terkuat terhadap kepunahan sebuah bahasa daerah. Ketika para penutur bahasa daerah melihat bahasa daerahnya tidak lagi fungsional, kurang bergengsi, tidak keren, atau bahkan kampungan, keadaan dan cara pandang seperti itu menjadi pintu gerbang pertama bagi bahasa daerah untuk memasuki keranda matinya.

Telah banyak upaya pelestarian bahasa daerah yang dilakukan. Pemerintah pusat, melalui Badan Bahasa dan unit pelaksana teknisnya di 30 provinsi, banyak

melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan setempat. Upaya itu bukan tidak berhasil, melainkan belum optimal. Tampaknya, kekurangoptimalan itu terjadi karena perlindungan bahasa daerah belum dilandasi pemikiran yang komprehensif/holistik dan integratif. Dikatakan tidak komprehensif karena hanya mengambil bagian kecil dari perlindungan bahasa, yaitu mendokumentasikan aspek kebahasaan dan mementaskan sastra lokal bersama masyarakat tutur.

Sehubungan dengan itu, inisiatif untuk mengubah arah dan praktik perlindungan bahasa daerah mulai digulirkan Badan Bahasa. Pelindungan bahasa yang awalnya lebih dipahami sebagai bentuk proteksi dibuat lebih dinamis melalui konsep revitalisasi. Upaya ini dilakukan sebagai cara menghidupkan kembali hasrat dan minat penutur bahasa daerah untuk menggunakan bahasanya. Pendekatan revitalisasi ini dilakukan dengan model revitalisasi dengan tetap memperhatikan karakteristik daerah dan bahasanya. Bahkan, untuk memperkuat upaya ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Merdeka Belajar Episode Ke-17 yang bertajuk Revitalisasi Bahasa Daerah pada Selasa, 22 Februari 2022. Peluncuran kebijakan ini bertepatan dengan momen Hari Bahasa Ibu Internasional pada 21 Februari 2022. Revitalisasi yang diusung Kemendikbudristek ini merupakan pendekatan baru untuk revitalisasi bahasa daerah di Indonesia.

Untuk mendapat pemahaman lebih komprehensif perihal revitalisasi bahasa daerah, kehadiran buku *Pedoman Revitalisasi Bahasa Daerah* ini tentu sangat urgen. Sebagai pedoman, buku ini tidak hanya dipakai oleh para pihak di lingkungan Badan Bahasa, tetapi dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan di pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Kehadiran pedoman ini tentu saja sangat berarti agar upaya revitalisasi bahasa daerah menjadi kerja bersama yang integratif dan berkelanjutan.

Kepala,

E. Aminudin Aziz

DAFTAR ISI

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Sasaran	3
1.5 Ruang Lingkup	3
1.6 Indikator Keberhasilan	4
2.1 Isu Global Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah	5
BAB II KONSEP DASAR PELINDUNGAN BAHASA DAERAH	5
2. 2 Situasi Kebahasaan di Indonesia	17
2.2.1 Situasi diglosik	20
2.2.2 Situasi Triglosik	20
2.2.3 Dampak globalisasi pada situasi kebahasaan di Indonesia	21
2.2.4 Pelindungan Bahasa-Bahasa Daerah	22
2. 3 Tantangan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah	23
2.4. Praktik Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah Selama Ini	28
3.1 Konsep Dasar Revitalisasi Bahasa Model B	31
BAB III PENDEKATAN BARU PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH MODEL B	31
3.2. Kurikulum/Materi Revitalisasi Model B	34
3.2.1 Pembelajaran Berbasis Pencelupan (Immersion program)	35
3.2.2 Pembelajaran Berbasis Praktik Satu Hari Berbahasa Daerah (One-day Language Practice)	35
3.2.3 Pembelajaran Berbasis Teknologi	35
3.2.4 Pembelajaran Berbasis Keagamaan	36
3.2.5. Pembelajaran Berbasis Seni dan Budaya	37
3.2.6. Pembelajaran Berbasis Kreativitas	39
3.3 Kemitraan	39
3.3.1 Pemerintah Daerah	40
3.3.2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	40
3.3.3 Lembaga Pendidikan	41
3.3.4 Lembaga Seni dan Budaya	41

3.3.5 Lembaga Keagamaan	42
3.3.6 Komunitas	42
3.3.7 Orang Tua/ Wali Murid	42
3.3.8. Perusahaan Swasta	42
3.4. Implementasi program	43
3.4.1. Survei dan Koordinasi	43
3.4.1.1 Survei	43
3.4.1.2 Koordinasi	44
3.4.2 Pelatihan dan Pembelajaran	44
3.4.2.1 Pelatihan	44
3.4.2.2 Pembelajaran	45
3.4.3 Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI)	45
3.5. Pengendalian Mutu: Pengawasan dan Evaluasi	46
BAB IV PENUTUP	49
DAFTAR RUJUKAN	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah bahasa dan sastra daerah di Indonesia yang banyak memiliki status dan penanganan yang berbeda-beda. Penentuan status suatu bahasa dan sastra dilakukan melalui kajian vitalitas. Setelah diketahui tingkat vitalitasnya, kita baru dapat menentukan sikap. Ada bahasa dan sastra yang masih dapat direvitalisasi karena masih mempunyai potensi untuk bertahan. Ada pula bahasa dan sastra yang hanya diperlukan konservasi, tetapi ada pula bahasa dan sastra yang dapat dikonservasi dan direvitalisasi sekaligus.

Konservasi dan revitalisasi tersebut merupakan suatu upaya perlindungan terhadap bahasa dan sastra daerah agar tidak segera mengalami kepunahan. Upaya perlindungan bahasa dan sastra tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yaitu dalam Pasal 45 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara terperinci bahwa perlindungan dapat dilakukan dengan cara pemetaan, kajian vitalitas, konservasi, revitalisasi, dan registrasi bahasa dan sastra.

Dari berbagai upaya perlindungan bahasa dan sastra daerah, revitalisasi bahasa dan sastra memiliki peran penting, yaitu (1) menjaga keaslian bahasa dan sastra daerah untuk tetap hidup; (2) mendapatkan kembali hubungan bahasa dan sastra daerah dengan cara-cara penutur mempertahankannya; (3) membangun kembali tradisi komunitas bahasa dan sastra daerah; (4) menemukan fungsi baru dari sebuah bahasa dan sastra daerah; dan (5) menghadirkan generasi baru dari penutur bahasa dan sastra daerah.

Peran revitalisasi sebagai langkah perlindungan bahasa dan sastra daerah tersebut harus didukung oleh adanya pedoman revitalisasi bahasa dan sastra. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan perevitalisasi yang ada di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga kebahasaan di Indonesia yang melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra. Dengan demikian, kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra dapat berjalan optimal dengan koordinasi yang jelas dan terarah sesuai dengan peta jalan upaya perlindungan bahasa dan sastra.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra daerah adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2016 Rincian Tugas Kantor Bahasa.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.
11. Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka sesuai Peraturan Mendikbud No. 3 Tahun 2020, memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya.

1.3 Tujuan

Tujuan pedoman ini adalah untuk memberikan penjelasan prosedur pelaksanaan implementasi model revitalisasi bahasa daerah, di lingkungan Badan Bahasa maupun Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti perguruan tinggi dan komunitas penutur.

1.4 Sasaran

Sasaran pedoman ini adalah pelaksana revitalisasi bahasa dan sastra di lingkungan Badan Bahasa, Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti perguruan tinggi dan komunitas penutur.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan revitalisasi bahasa dan sastra meliputi (1) langkah kerja dan (2) tahapan aksi kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra.

1.6 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pelaksanaan revitalisasi bahasa dan sastra mencakup

1. sambutan baik dari masyarakat dan pemerintah daerah yang ditandai dengan partisipasi masyarakat, pimpinan daerah, tokoh agama, tokoh adat pada saat festival/pertunjukan hasil revitalisasi bahasa dan sastra;
2. dukungan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan mulai dari tingkat dusun/desa, kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten/kota bahkan tingkat provinsi dengan dibuatnya peraturan/nota komitmen tentang perlindungan bahasa dan sastra di daerah tersebut;
3. dukungan perguruan tinggi selaras dengan implementasi program Merdeka Belajar khususnya program MBKM Revitalisasi Bahasa Daerah;
4. dukungan dinas pendidikan dan sekolah dalam implementasi program Merdeka Belajar: Revitalisasi Bahasa Daerah (untuk revitalisasi berbasis sekolah);
5. hasil revitalisasi bahasa dan sastra teraktualisasi di lingkungan masyarakat, sekolah, ataupun komunitas tutur melalui nota kesepahaman.

BAB II

KONSEP DASAR PELINDUNGAN BAHASA DAERAH

2.1 Isu Global Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah

Kepunahan bahasa daerah dan sastra daerah, menjadi gejala global yang terjadi di berbagai negara. Bahkan menurut catatan UNESCO, hampir setiap pekan ada satu bahasa ibu yang hilang. Mengutip perkataan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Prof Endang Aminudin Aziz M.A., Ph.D. saat membuka Festival Tunas Bahasa Ibu (*Suara Merdeka*, 2021) bahwasanya “Di Indonesia ada 718 bahasa daerah. Terbanyak kedua setelah Papua Nugini yang mempunyai 830 bahasa daerah. Pada 2019, tercatat ada 11 Bahasa Daerah di Indonesia yang dinyatakan punah. UNESCO mencatat, secara global, setiap pekan ada satu bahasa daerah hilang”.

Dalam pedoman ini, kami menggunakan istilah Bahasa Daerah, alih alih Bahasa Ibu. Merujuk pada catatan Bühmann & Trudell (2008), bahwa bahasa daerah didefinisikan sebagai *“Local language refers to the language spoken in the homes and marketplaces of a community, as distinguished from a regional, national or international language”* “Bahasa lokal mengacu pada bahasa yang digunakan di rumah dan pasar suatu komunitas, yang dibedakan dari bahasa regional, nasional, maupun internasional”. Lebih lanjut, Bühmann & Trudell (2008) mendefinisikan, bahasa Ibu *“Mother tongue or mother language refers to a child’s first language, the language learned in the home from older family members”* “Bahasa ibu mengacu pada bahasa pertama seorang anak, bahasa yang dipelajari di rumah dari anggota keluarga yang lebih tua”. Dengan demikian, kami beranggapan bahwa dalam buku pedoman ini, penggunaan istilah “bahasa daerah” dianggap lebih cocok karena bersifat lebih umum. Di samping itu, penggunaan istilah “bahasa daerah” juga sejalan dengan peristilahan yang telah dipakai di dalam UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2009, serta PP No. 57 Tahun 2014.

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) secara resmi mengatakan hampir 2.500 bahasa di seluruh dunia di ambang kepunahan. Hal itu diungkapkan oleh Ocal Oguz, ketua Komisi Nasional Turki untuk UNESCO. “Di antaranya, hampir 2.500 bahasa menghadapi kepunahan karena jumlah penuturnya sangat sedikit,” kata Oguz, seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari Anadolu Agency, Senin, 22 Februari 2021. “Sayangnya, menurut statistik dan data yang dikumpulkan, salah satu bahasa ini menghilang setiap 15 hari.” Oguz mengatakan bahaya bahasa dan menghilang terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir karena perubahan sosial, politik dan ekonomi di dunia. Ia menyebutkan bahwa bahasa yang digunakan oleh kurang dari 10.000 orang di dunia sebagian besar terancam punah.

Menurut catatan Grimes (1988), sebagaimana yang disebutkan dalam *Ethnologue: Languages of the World* (selanjutnya disebut *Ethnologue*, terdapat 6.809 bahasa di dunia. Dari jumlah tersebut 330 bahasa memiliki penutur sebanyak satu juta orang atau lebih. Jumlah penutur yang besar ini kontras (secara mencolok) dengan kira-kira 450 bahasa di dunia yang memiliki jumlah penutur yang sangat kecil, sudah berusia tua dan condong bergerak menuju ke kepunahan. Pada saat yang sama, jumlah rerata penutur bahasa-bahasa di dunia hanya berkisar 6.000 orang atau lebih, hanya separuhnya memiliki penutur 6.000 orang atau lebih penutur, dan hanya separuhnya lagi memiliki penutur kurang dari 6.000 orang.

Sementara itu, menurut UNESCO bahasa harus digunakan oleh minimal 10.000 orang untuk memastikan pertukaran antargenerasi. UNESCO juga memprediksi terdapat lebih dari setengah bahasa yang ada akan punah pada akhir abad ini. Sejak tahun 1951, UNESCO telah merekomendasikan penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar pendidikan. Hal itu merupakan langkah konkret pemertahanan dan pemberdayaan bahasa ibu. UNESCO telah menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya bahasa ibu untuk terus diperingati dalam pengertian dipertahankan pemakaiannya dan diberdayakan fungsinya (Ibda, 2017).

Sebagai etnis yang multikultur, bangsa Indonesia merupakan himpunan berbagai jenis masyarakat yang berbeda ragam sifat karakter dan adat budayanya (Purwaningsih, 2012). Salah satu bukti dari pernyataan tersebut ialah Indonesia sangat kaya dengan bahasa dan sastra daerah. Kekayaan itu di satu sisi merupakan kebanggaan, tetapi di sisi lain menjadi tugas yang tidak ringan, terutama apabila memikirkan bagaimana cara melindungi, menggali manfaat, dan mempertahankan keberagamannya. Pada sekelompok masyarakat, bahasa daerah merupakan bahasa ibu,

sementara bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi bangsa Indonesia.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Berlianty dan Balik (2018) dalam *Ethnologue* disebutkan bahwa terdapat 726 bahasa di Indonesia. Sebagian masih akan berkembang, tetapi tidak dapat diingkari sebagian besar bahasa itu akan punah. Di Indonesia terdapat lebih dari 640 bahasa daerah yang di dalamnya terdapat sekitar 154 bahasa yang harus diperhatikan, yaitu sekitar 139 bahasa terancam punah dan 15 bahasa yang benar-benar telah mati. Bahasa yang terancam punah terdapat di Kalimantan (1 bahasa), Maluku (22 bahasa), Papua Barat dan Kepulauan Halmahera (67 bahasa), Sulawesi (36 bahasa), Sumatra (2 bahasa), serta Timor-Flores dan Bima-Sumbawa (11 bahasa). Sementara itu, bahasa yang telah punah berada di Maluku (11 bahasa), Papua Barat dan Kepulauan Halmahera, Sulawesi, serta Sumatera (masing-masing 1 bahasa).

Badan Bahasa juga telah melakukan kajian vitalitas bahasa untuk menentukan daya hidup atau vitalitas suatu bahasa daerah. Dari 718 bahasa yang sudah dipetakan, baru 113 bahasa yang dikaji vitalitasnya atau bahasa daerah yang teridentifikasi vitalitas bahasanya baru sekitar 15% dari jumlah bahasa yang sudah terpetakan (berdasarkan kajian vitalitas bahasa pada 2011—2021). Hasilnya, 5 bahasa dikategorikan punah, 8 bahasa kritis, 26 bahasa terancam punah, 29 bahasa mengalami kemunduran, 27 bahasa dalam kondisi rentan (stabil, tetapi terancam punah), dan 18 bahasa berstatus aman.

Tabel 1 Vitalitas Bahasa Daerah di Indonesia

Status	No	Bahasa Daerah	Wilayah
Aman	1	Bahasa Asmat	Papua
	2	Bahasa Walsu	Papua
	3	Bahasa Biak	Papua
	4	Bahasa Bima (Mbojo)	Nusa Tenggara Barat
	5	Bahasa Bugis	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah
	6	Bahasa Dajub (Tokuni)	Papua
	7	Bahasa Korowai Karuwage (Korowage)	Papua
	8	Bahasa Melayu	Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung
	9	Bahasa Madura	Jawa Timur
	10	Bahasa Makassar	Sulawesi Selatan
	11	Bahasa Minangk- abau	Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Bengkulu
	12	Bahasa Muna	Sulawesi Tenggara
	13	Bahasa Sasak	Nusa Tenggara Barat
	14	Bahasa Sentani	Papua
	15	Bahasa Serui Laut	Papua
	16	Bahasa Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
	17	Bahasa Kombai	Papua
	18	Bahasa Tagalisa	Maluku

Rentan	1	Bahasa Aceh	Sabang (Aceh)
	2	Bahasa Bali dialek Bali Daratan	Bali
	3	Bahasa Jawa dialek Jogja-Solo	D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah
	4	Bahasa Sunda	Jawa Barat
	5	Bahasa Aframa	Papua
	6	Bahasa Bugis (NTB)	Nusa Tenggara Barat
	7	Bahasa Dondo dialek Dampelas	Sulawesi Tengah
	8	Bahasa Gayo	Aceh
	9	Bahasa Klesi	Papua
	10	Bahasa Kerinci	Sumatra
	11	Bahasa Kuri/Nabi	Papua
	12	Bahasa Luhu	Maluku
	13	Bahasa Mandar	Sulawesi
	14	Bahasa Meoswar (Roswar)	Papua
	15	Bahasa Minahasa	Sulawesi
	16	Bahasa Melayu (Betawi)	D.K.I. Jakarta
	17	Bahasa Oirata	Maluku
	18	Bahasa Ormu	Papua
	19	Bahasa Pamona	Sulawesi Tengah
	20	Bahasa Rongga	Nusa Tenggara Timur
	21	Bahasa Senggi (Find)	Papua
	22	Bahasa Somu (Toro)	Papua
	23	Bahasa Wolio	Sulawesi Tengah
	24	Bahasa Lampung	Lampung
	25	Bahasa Modole	Maluku Utara
	26	Bahasa Marori	Papua
	27	Bahasa Seget	Papua Barat

Fakta kepunahan bahasa seperti dalam paparan tersebut, ternyata menyebar di hampir seantero bumi (Ibrahim, 2011). Ada beberapa hal menarik yang dapat dicatat. *Pertama*, bahasa-bahasa yang terancam punah itu sebagian besarnya berada di daerah atau wilayah atau negara berkembang dengan keterbatasan sumber daya manusia dan juga sumber daya alam. *Kedua*, beberapa di antaranya memiliki total populasi etnik yang tidak lebih dari 5.000 orang. Jadi, bahasa-bahasa ini sesungguhnya telah terancam punah diantara begitu banyak total populasinya. *Ketiga*, sebagian besar dari bahasa-bahasa yang terancam punah itu merupakan etnik minoritas terisolasi atau minoritas yang berada dalam wilayah yang begitu beragam bahasa dan budayanya. *Keempat*, bahasa-bahasa yang terancam punah itu, sebagian besarnya tidak merupakan bahasa yang sehari-hari diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya di rumah. *Kelima*, fakta-fakta mengenai kepunahan bahasa-bahasa itu sebagian besarnya berasal dari wilayah multibahasa yang memilih sebuah bahasa lingua-franca dalam komunikasi lintas etnis.

Dalam konteks seperti ini, bila kebijakan politik bahasa nasional di satu sisi sebagai kebijakan kebahasaan yang mempersatukan keragaman dalam konteks pengelolaan negara dan nasionalisme yang tidak disertai dengan kebijakan preservasi bahasa-bahasa lokal, kebijakan perencanaan, pembinaan, dan pengembangan bahasa nasional justru akan meminggirkan bahasa-bahasa lokal. Padahal, bahasa-bahasa lokal merupakan ‘wadah kebudayaan lokal’ sebagai pilar penting terbentuknya negara-bangsa. Karena itu, kepunahan bahasa-bahasa lokal dalam sebuah masyarakat multilingual dan negaranya mengambil kebijakan penggunaan bahasa nasional sebagai lingua-franca. Karena itu, perlu ada program-program penguatan bahasa lokal secara lebih terencana agar terhindar dari ancaman kepunahan.

Bahasa daerah tersebut memiliki beberapa fungsi yang sangat besar dalam masyarakat di suatu daerah, yakni sebagai bahasa lokal dalam satu suku; sebagai bahasa dalam adat istiadat di daerah; sebagai kekayaan budaya daerah (Afria, 2017). Bahasa daerah merupakan warisan budaya tak benda, khususnya warisan berharga dari tradisi dan ekspresi lisan masyarakat tuturnya. Bahasa daerah tidak hanya tercermin dari aktivitas komunikasi sehari-hari, tetapi juga didapatkan di dalam manuskrip atau naskah kuno, puisi, legenda, peribahasa maupun cerita rakyat. Seandainya banyak kosakata bahasa daerah yang hilang maka akan merugikan pemahaman masyarakat penutur terhadap berbagai macam bentuk kata yang dikandung oleh alam semesta. Karena itu, sangatlah penting adanya penyelamatan dan perlindungan bahasa (kosakata kuno) sebagai bentuk kepedulian dengan bahasa sendiri.

Dari sudut pandang daya hidupnya, bahasa tipe pertama adalah bahasa yang diprediksi masih panjang usia hidupnya, sedangkan bahasa tipe kedua dan ketiga, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama akan mengalami kepunahan. Dalam kaitannya dengan daya hidup bahasa-bahasa di dunia, Michel Krauss (1992: 4-10) mengelompokkan bahasa-bahasa di dunia ke dalam tiga tipologi: (1) bahasa-bahasa yang punah (*moribund languages*), (2) bahasa-bahasa yang terancam punah (*endangered languages*), dan (3) bahasa-bahasa yang masih aman (*safe languages*). Bahasa-bahasa yang dikategorikan *moribund*, menurut Krauss, adalah bahasa yang tidak lagi digunakan dipelajari (atau diperoleh) oleh anak-anak sebagai bahasa ibunya (*mother tongue, mother language*); bahasa-bahasa yang *endangered* adalah bahasa-bahasa yang meskipun sekarang masih dipelajari (atau diperoleh) oleh anak-anak, akan ditinggalkan anak-anak pada abad akan datang; sementara bahasa-bahasa yang *safe* adalah bahasa-bahasa yang mendapat sokongan kuat dari pemerintah dan memiliki sejumlah besar penutur.

Fenomena krisis jumlah penutur bahasa merupakan sebuah keadaan yang saat ini mendapatkan perhatian khusus dari banyak pihak. Krisis jumlah penutur sebagai tanda-tanda kepunahan (sebuah) bahasa adalah krisis menyedihkan dan menakutkan sebab fakta ini menyodorkan kepada kita lanskap mengenai punahnya sebuah peradaban melalui kepunahan bahasa (Ibrahim, 2011). Krisis jumlah penutur ini merupakan tanda yang nyata mengenai pengabaian oleh penutur terhadap bahasanya sendiri. Krisis ini juga merupakan tanda bahwa kemampuan bertahan hidup penutur bahasa minoritas sangat lemah atas banyak faktor.

Beberapa gejala berikut merupakan beberapa gejala kepunahan bahasa pada masa depan adalah: (1) penurunan secara drastis jumlah penutur aktif, (2) semakin berkurangnya ranah penggunaan bahasa, (3) pengabaian atau pengenyahan bahasa ibu oleh penutur usia muda, (4) usaha merawat identitas etnik tanpa menggunakan bahasa ibu, (5) penutur generasi terakhir tak cakap lagi menggunakan bahasa ibu (penguasaan pasif, *understanding without speaking*), dan (6) contoh-contoh mengenai semakin punahnya dialek-dialek satu bahasa, keterancaman bahasa Kreol dan bahasa sandi (Grimes 2000).

Dalam buku “*The Routledge Handbook of Language Revitalization*” yang direSENSI oleh Nazarudin (2021) disebutkan ada beberapa riset global yang menyatakan bahwa kepunahan bahasa ini banyak pula diawali dengan fenomena pergeseran bahasa. Pada beberapa riset dinyatakan bahwa pergeseran bahasa terkadang dianggap sebagai “pilihan penutur” sehingga dapat pula dipertanyakan seberapa “bebas” pilihan itu. Atau mungkin, pilihan itu terkait erat dengan relasi kuasa yang yang tidak seimbang,

misalnya antara kelompok bahasa dominan dan minoritas. Pada beberapa kasus, punahnya sebuah bahasa juga merupakan akibat dari faktor sejarah, seperti kolonisasi, yang merusak kelompok minoritas dan kelompok yang termarginalkan, yang kemudian terpaksa harus pergi dari tanah mereka sendiri. Bahkan di era pos-kolonial sekarang ini, pertumbuhan ekonomi dunia dan globalisasi terus menggerus penutur bahasa minoritas. Hal ini terlihat dari semakin berkurangnya ranah penggunaan bahasa-bahasa lokal yang terus bergeser sampai ke ranah budaya.

Selain penyebab di atas, beberapa penyebab lain sebuah bahasa dapat terancam keberadaannya disebutkan oleh Schmidt (2008) yaitu sebagai berikut.

a) Status hukum suatu bahasa & institusi

Fakta bahwa suatu bahasa dapat diakui sebagai bahasa minoritas (bahasa daerah), pertama-tama mempengaruhi penyebarannya dan penggunaannya di antara masyarakat, tetapi juga meningkatkan prestisenya. Akan tetapi, jika status suatu bahasa tidak sesuai dengan status atau fungsinya secara dalam masyarakat, hal itu sebenarnya dapat menunjukkan bahwa hak-hak penuturnya sedang dilanggar. Dengan demikian mereka mungkin merasakan tekanan untuk beralih ke bahasa mayoritas agar tidak dikucilkan dari kehidupan publik.

b) Nilai simbolis suatu bahasa

Ini terutama tercermin dalam sikap bahasa dan dapat mengubah bahasa menjadi varietas yang bergengsi secara sosial atau terstigma. Bahasa minoritas sangat sering dianggap sebagai bahasa yang membawa tradisi dan karena bersifat folkloristik dan ketinggalan zaman, sedangkan bahasa yang dominan mencerminkan modernitas. Dalam kasus kehilangan bahasa, minoritas mungkin masih menganggap bahasa aslinya sebagai nilai kunci.

c) Fungsionalitas yang terbatas atau lemah

Aspek bahasa minoritas atau bahasa daerah sering menjadi alasan mengapa penuturnya sendiri beralih ke bahasa mayoritas. Mereka merasa bahwa bahasa ibu mereka tidak mengikuti perkembangan modern. Dalam konteks itu bahasa minoritas diperlakukan ‘hanya’ sebagai penanda identitas budaya etno belaka, dengan nilai yang lebih sentimental daripada instrumental. Namun, filosofi “bahasa asli-identitas” tidak memperhitungkan kelompok yang tidak menggunakan bahasa “warisan” sebagai penanda identitas.

d) Faktor demografi

Faktor ini mencakup sebagian besar aspek statistik, terutama untuk beberapa hal, contohnya: jumlah individu dalam suatu kelompok, perilaku reproduksi mereka, jumlah perkawinan campuran, imigrasi. dan emigrasi, mobilitas sosial. Juga teritorialitas kelompok dan konsentrasinya di wilayah yang sama, dan proporsi kelompok terhadap kelompok lain berdampak pada sikap bahasa, keberlanjutan atau kehilangan bahasa.

e) Faktor partisipatif - peluang ekonomi dan sosial

Tidak ada keraguan bahwa dalam masyarakat multietnis, peluang partisipasi lebih tinggi bagi orang-orang yang menguasai lebih dari satu bahasa. Dengan demikian, kapasitas dwibahasa menduduki peringkat tertinggi di pasar tenaga kerja, sedangkan pengetahuan tentang bahasa minoritas saja biasanya dianggap tidak mencukupi.

Ibrahim (2011) mengemukakan bahwasanya terdapat tiga sebab utama kepunahan bahasa, yaitu (a) karena para orang tua tidak lagi mengajarkan bahasa ibu kepada anak-anak serta tidak lagi menggunakannya di rumah, (b) pilihan sebagian masyarakat tutur untuk tidak menggunakannya dalam ranah komunikasi sehari-hari, dan (c) tekanan sebuah bahasa mayoritas dalam masyarakat tutur multilingual. Berdasarkan sebab-sebab tersebut, sebab pertama dan kedua dinilai memiliki keterkaitan dengan sikap dan pemertahanan bahasa (*language maintenance*) masyarakat tuturnya. Jika pilihan untuk tidak menggunakan dan kebiasaan orang tua untuk tidak mewariskan bahasa ibu kepada anak-anaknya lemah, gerak menuju kepunahan akan lebih cepat lagi. Sebaliknya, bahasa-bahasa yang penuturnya memiliki pemertahanan bahasa yang kuat, memiliki vitalitas hidup kuat pula. Sementara itu, sebab ketiga terkait dengan dominasi komunikasi dalam mobilitas sosial-ekonomi serta penguasaan sumber-sumber kekuasaan kelompok mayoritas pemilik bahasa mayoritas yang mau tidak mau harus dihadapi oleh semua penutur, terutama penutur bahasa minoritas. Kelompok pemilik bahasa mayoritas yang karena penguasaan atas sumber-sumber kegiatan ekonomi, politik, pendidikan, dan kekuasaan secara politis, "memaksa" kelompok penutur bahasa minoritas mau tidak mau harus melakukan mobilitas vertikal dalam kerangka melakukan penyesuaian sosial agar menjadi bagian penting dalam proses kemajuan masyarakatnya. Mekanisme penyesuaian ini tidak hanya membuat penutur bahasa minoritas meninggalkan wilayah teritori tradisionalnya tetapi juga "meninggalkan" bahasa ibunya kemudian semakin menggunakan sebuah bahasa mayoritas. Mekanisme ini secara lambat-laun turut memberi dampak pada dua hal terkait dengan penggunaan bahasa ibunya. Pertama, semakin berkurang jumlah penutur bahasa ibu kelompok minoritas dan kedua

semakin menyempit pula ranah-ranah penggunaan bahasa ibu. Pada titik nadir, bahasa ibu hanya tinggal digunakan dalam percakapan yang bersifat rahasia, dan itu berarti bahasa ibu sesungguhnya telah mati.

Diterangkan lebih lanjut, hilangnya daya hidup bahasa daerah pada umumnya disebabkan oleh pindahannya orang desa ke kota untuk mencari penghidupan yang dianggap lebih layak dan perkawinan antaretnis yang banyak terjadi di Indonesia. Masyarakat perkotaan, yang pada umumnya merupakan masyarakat multietnis atau multilingual, memaksa seseorang harus meninggalkan bahasa etnisnya dan menuju bahasa nasional. Pada umumnya, bahasa etnis setiap orang tua akan ditinggalkan dan bahasa Indonesia kemudian digunakan dalam keluarga itu karena bahasa itu dianggap sebagai bahasa yang dapat menghubungkan mereka secara adil. Kepunahan bahasa-bahasa daerah merupakan fenomena yang perlu dicermati dan disikapi secara serius dan bijaksana. Berbagai faktor yang dapat menyebabkan kepunahan bahasa sebagaimana dikemukakan di atas tampaknya dapat dikategorikan ke dalam dua bagian besar yaitu faktor alamiah dan faktor non-alamiah. Faktor alamiah yang tidak dapat dihindari kejadiannya dapat berupa bencana alam (*natural disaster*), pengaruh bahasa mayoritas, komunitas bahasa yang bilingual atau multilingual, pengaruh globalisasi, migrasi (*migration*), perkawinan antaretnik (*intermarriage*). Sementara itu, kurangnya penghargaan terhadap bahasa daerah, kurangnya intensitas pemakaian bahasa daerah, pengaruh faktor ekonomi, dan pengaruh pemakaian bahasa Indonesia merupakan faktor-faktor penyebab yang bersifat non-alamiah. Selain itu, sejumlah besar bahasa hanya memiliki bentuk lisan dan tidak ada tata cara penulisan yang benar (Tondo, 2009).

Salah satu sifat bahasa adalah dinamis (berubah-ubah) sesuai dengan perkembangan zaman dan kehidupan sosial berbahasa penutur. Misalnya, kosakata sebuah bahasa yang digunakan mengalami perubahan dan pembaharuan karena kosakata yang lama jarang digunakan. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya percaya diri masyarakat dalam menggunakan bahasanya, dipengaruhi oleh modernisasi, faktor sosial dengan memandang bahasa daerah merupakan bahasa yang dipakai oleh golongan bawah, petani, pedagang, atau buruh. Namun, dalam segi keilmiah bahasa tidak memandang bahwasanya ada tingkatan-tingkatan bahasa (*prestise* atau tidak) (Afria, 2017).

Dalam masyarakat majemuk, tiap orang memiliki karakter dan cara berbahasa yang berbeda. Penguasaan bahasa pada anak juga dipengaruhi keluarga, lingkungan setempat dan teknologi. Dalam psikolinguistik, ada tiga hal mendasar dalam bahasa, yaitu (1) pemahaman bahasa; (2) pemerolehan bahasa dan (3) produksi bahasa (Sudipa, 2009:1). Namun

yang sangat penting di era milenial sekarang adalah “pemertahanan bahasa” untuk menjaga kekayaan dan identitas bangsa (Ibda, 2017).

Vitalitas bahasa secara keseluruhan terkait dengan kombinasi antara faktor sosial, politik, demografis, dan praktis. Tanpa disadari pun, keseluruhan faktor tersebut biasanya berperan sekaligus. Salah satu contoh relevansi terbesar adalah faktor sosial dan politik, yaitu praktik penggunaan bahasa dalam berbagai domain, termasuk rumah, sekolah, tempat ibadah, kantor pemerintah, di jalan-jalan, di toko-toko, di tempat kerja. Ketersediaan bahasa sasaran dalam berbagai ranah tersebut tidak selalu merupakan keputusan individu penutur, tetapi seringkali ditentukan oleh kebijakan bahasa dan pendidikan (Grenoble, 2021). Hal ini terkait dengan prestise sosial suatu bahasa, yang pada gilirannya terkait dengan motivasi penutur untuk menggunakan bahasa tersebut, dan juga terkait dengan kekuatan ekonomi suatu bahasa: apakah masyarakat yang mengetahui bahasa tersebut bisa memandangnya sebagai peluang atau justru menghalangi mereka?

Hal itu menjadi urgen karena saat ini kondisi bahasa anak saat ini sangat kacau dan rusak. Padahal kerusakan bahasa menjadi salah satu tanda kehancuran suatu bangsa. Lickona (1991) menjelaskan ada 10 tanda kehancuran suatu bangsa, yaitu *violence and vandalism, stealing, cheating, disrespect for authority, peer cruelty, bigotry, bad language, sexual precocity and abuse, increasing self centeredness and declining civic responsibility, self destructive behavior*. Pendapat Thomas Lickona tersebut ditafsirkan Martianto (2002) menjadi pertama, meningkatnya kekerasan di kalangan pelajar. Kedua, penggunaan bahasa dan kata-kata buruk. Ketiga, pengaruh *peer group* yang kuat dalam tindak kekerasan. Keempat, meningkatnya perilaku merusak diri (penggunaan narkoba dan seks bebas). Kelima, semakin kaburnya pedoman baik dan buruk. Keenam, menurunnya etos kerja. Ketujuh, rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Kedelapan, rendahnya rasa tanggungjawab individu dan warga negara. Kesembilan, membudayanya ketidakjujuran. Kesepuluh, adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama.

Salah satu poin penting dari sepuluh kerusakan menurut Thomas Lickona (1991) itu adalah *bad language* atau penggunaan bahasa dan kata-kata buruk. Bisa disimpulkan, kerusakan bahasa menjadi hal mendesak yang harus dibenahi karena menjadi indikator kehancuran suatu bangsa. Kerusakan itu akan semakin parah jika mendera di kalangan anak-anak, pelajar dan mahasiswa. Anak-anak sebagai pelajar di daerah pedesaan saat ini tidak jauh berbeda dengan di kota-kota. Kebanyakan mereka menggunakan bahasa yang “*semrawut*” dan tidak bisa membedakan, mana bahasa sendiri dan mana yang serapan, mana bahasa asli dan mana yang asing. Pengaruh teknologi dengan adanya gawai, internet, media sosial (medsos) juga membuat anak-

anak semakin kacau dalam berbahasa. Penggunaan bahasa lisan dan tulisan yang rusak justru menggeser bahasa ibu sebagai bahasa pertama. Banyak sekali bahasa ibu yang terdiri atas bahasa daerah/lokal dan Bahasa Indonesia rusak dan digantikan bahasa lain yang arbitrer (mana suka) dan bahasa slang (tidak baku/musiman).

Berikut ini adalah contoh bahasa-bahasa yang digunakan oleh anak muda (remaja) yang disebut bahasa gaul dengan berbagai proses pembentukannya yang unik. Mengadopsi berbagai bahasa baik bahasa daerah maupun bahasa asing kemudian disesuaikan dengan lafal anak muda atau bahkan pengucapannya dibalik. Sebagai contoh kata *slow* dibaca sesuai lafal masyarakat Indonesia *selow* dan menjadi bahasa gaul (anak muda) *woles* karena dibaca dari kiri ke kanan. Bunyi sangat berperan dalam pembentukan bahasa gaul. Bahasa gaul *cinus me apa* jika direkonstruksi berasal dari “Serius, demi apa?” yang pelafalannya sesuai dengan lafal anak-anak (Sartini, 2014). Hal semacam ini sangat sering dijumpai di Indonesia. Hal ini tentu menjadi ancaman yang serius bagi konsistensi bahasa, khususnya Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional.

Fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dalam hal bahasa, baik bahasa ibu, bahasa daerah, maupun bahasa nasional tentu harus diselaraskan dengan berbagai upaya perlindungan bahasa. Salah satu bentuk upaya yang perlu diketahui, diresapi, dan diaplikasikan dalam kehidupan berbahasa masyarakat pada umumnya yang dikenal sebagai upaya revitalisasi bahasa (Sartini, 2014; Hinton, Huss, & Roche, 2018). Dalam konteks kebahasaan atau linguistik, revitalisasi berarti menghidupkan kembali atau memberikan vitalitas atau energi baru (dalam hal ini pada bidang bahasa), sehingga dapat kembali pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang telah ditetapkan sebagai acuan berbahasa yang benar. Kekacauan bahasa yang terjadi dalam bahasa dan sikap acuh tak acuh terhadap bahasa menyebabkan terpuruknya sebuah bahasa yang telah diperjuangkan dengan proses yang sangat panjang. Apa yang telah menjadi simbol negara tersebut seakan-akan tidak pernah mendapat perhatian dan penghargaan. Perkembangannya yang “liar” tanpa kendali akan menjadikan bahasa yang ‘bebas’ tanpa prosedur penyerapan yang benar.

Untuk menghidupkan kembali dan menguatkan kembali bahasa-bahasa yang terancam punah, tergerus, dan stabil tetapi terancam, diperlukan tindakan-tindakan penyelamatan seperti: (1) penyusunan tata bahasa pedagogik dalam cetakan dan cakram rekaman, (2) kamus, (3) surat kabar, (4) kelas bahasa bagi anak dan remaja di kampung sendiri, (5) sekolah bahasa untuk anak berbasis masyarakat, (6) gerakan penggunaan bahasa ibu di rumah, dan (7) bertutur bahasa ibu dalam acara adat. Tentu saja teknik-

teknik perawatan ini memerlukan tahap-tahap pelaksanaannya, mulai dari survei mengenai kelayakan program, penyusunan silabus, uji coba, dan pelaksanaan yang sesungguhnya (Ibrahim, 2011).

Bahasa daerah bukan hanya alat komunikasi dan pendidikan, tetapi juga penyimpanan identitas, budaya, sejarah, tradisi, dan ingatan masyarakat. Bahasa dan budaya tersebut menghimpun kekayaan dan keragaman peradaban manusia. UNESCO telah mempromosikan keanekaragaman bahasa dan budaya sebagai faktor kunci untuk perdamaian dan pembangunan besar yang berkelanjutan. Ada lima prioritas yang menjadi faktor keberhasilan revitalisasi bahasa daerah, yaitu dukungan masyarakat, dukungan akademis, dukungan finansial, dukungan psikologis, dan dukungan kebijakan.

Dengan demikian, apabila bahasa daerah dalam kondisi kritis maka bersama bahasa daerah itu budaya daerah dan sistem pengetahuan leluhur ikut terancam punah. Karena itu, perlu perlindungan dan pelestarian bahasa yang menjamin hak masyarakat untuk melestarikan, merevitalisasi, dan mempromosikan bahasa daerah serta mengarusutamakan keragaman bahasa dan multibahasa ke dalam pembangunan berkelanjutan seiring perkembangan zaman. Termasuk di dalamnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung penggunaan, pelestarian bahasa daerah dengan harapan para penutur muda akan menjadi penutur aktif bahasa daerah dan mempelajari bahasa daerah dengan penuh suka cita melalui media yang mereka sukai.

2. 2 Situasi Kebahasaan di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai negara kedua di dunia yang memiliki paling banyak keanekaragaman bahasa setelah Papua Nugini (Evans, 2009). Steinhauer (1994) memberikan estimasi bahwa sepersepuluh dari bahasa-bahasa di dunia dapat dijumpai di bumi Indonesia. Ethnologue (2020) mencatat setidaknya ada 719 bahasa di Nusantara, 706 diantaranya masih digunakan secara aktif, sedangkan 13 lainnya dianggap sudah punah. Dari 706 bahasa yang masih dituturkan, ada 75 yang berada dalam status hampir punah. Sementara itu, Badan Bahasa menyampaikan hasil kajiannya bahwa hingga Oktober 2019, di Indonesia terdapat 718 bahasa. Jumlah tersebut diambil dari total 2.560 daerah pengamatan sebagai percontoh dari semua provinsi di seluruh Indonesia.



Gambar 1. Peta bahasa-bahasa di Indonesia (Badan Bahasa, 2019)

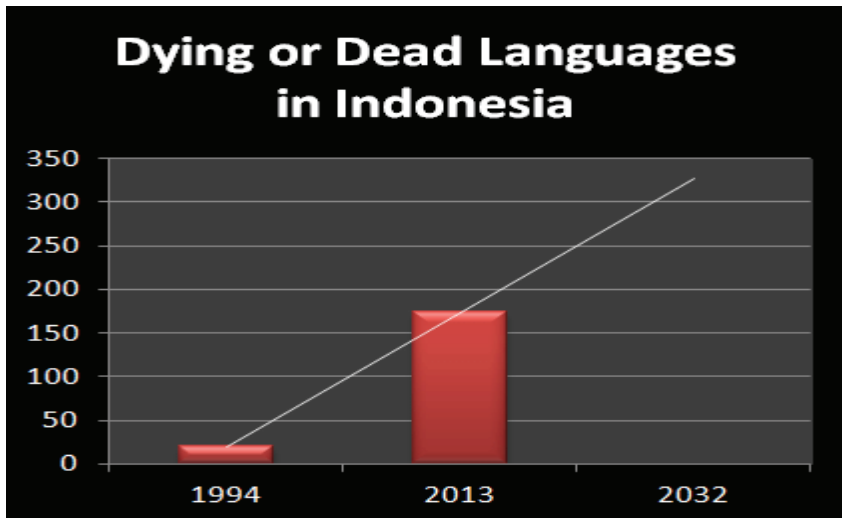
Data Ethnologue juga menyebutkan bahwa di Indonesia ada sepuluh bahasa daerah yang penuturnya paling banyak, yaitu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Minang, bahasa Musi, bahasa Bugis, bahasa Banjar, bahasa Aceh, bahasa Bali, dan bahasa Betawi (Ethnologue, 2020). Dari sepuluh bahasa tersebut, yang paling banyak penuturnya adalah bahasa Jawa dan Sunda (Riza, 2008).

Steinhauer (1994) dalam catatannya mengatakan dari 6.000 bahasa yang digunakan di seluruh dunia, antara 500 hingga 1.000 bahasa hanya diucapkan oleh segelintir orang. Selain itu, setiap tahunnya dunia kehilangan sekitar 25 bahasa ibu. Itu sama saja dengan kehilangan 250 bahasa selama satu dekade. Ini sebuah prospek yang menyedihkan bagi sebagian orang, sebagaimana yang diuraikan dalam bukunya yang berjudul “The Indonesian language situation and linguistics: Prospects and possibilities” (dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 150 Volumes of *Bijdragen; A Backward Glimpse and a Forward Glimpse* 150 (1994), No. 4, 755-784).

Pandangan lain terkait dengan situasi kebahasaan di dunia dan Indonesia dikemukakan oleh Koichiro Matsuura, direktur UNESCO, seperti dikutip Antara News.com pada Selasa, 20 Februari 2009, yang mengatakan bahwa kurang lebih 2.500 bahasa di dunia, termasuk bahasa-bahasa daerah di Indonesia, terancam punah dan hampir punah. Indonesia, India, AS, Brasil, dan Meksiko termasuk negara dengan keragaman bahasa lokal, yang saat ini sedang menghadapi ancaman terbesar kepunahan banyak bahasa. Matsuura menyebutkan bahwa kepunahan bahasa tertentu akan

menyebabkan punahnya berbagai bentuk warisan budaya, terutama tradisi dan ekspresi lisan pembicaranya, yang meliputi puisi dan cerita rakyat, serta peribahasa dan anekdot (The codification of native Papuan languages. *Journal of Arts and Humanities* (JAH) Warami et al., JAH (2020), Vol. 09, No. 10: 40-48).

Terdapat sekitar 178 bahasa lokal di Indonesia, yang saat ini berstatus terancam punah atau mengalami penurunan status. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain adalah adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota, yang penyebabnya terkait dengan faktor ekonomi, bencana alam, pendidikan, atau karier. Selain itu, faktor politik yang terfokus ke pusat (atau yang disebut sebagai sentralisasi) menyebabkan wilayah pinggiran, atau yang lokasinya jauh dari pusat kota, menjadi tertinggal khususnya terkait dengan informasi. Yang terakhir, adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan bahwa ranah pendidikan mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar atau media untuk berinteraksi. Dengan adanya tiga faktor tersebut, di masa depan bahasa daerah akan menghadapi ancaman serius dari kepunahan bahasa. Berikut adalah gambaran akan kepunahan bahasa daerah di Indonesia menurut Anderbeck (2013).



Gambar 2. Garis tren kepunahan bahasa daerah di Indonesia (Anderbeck, 2013:15)

2.2.1 Situasi diglosik

Gambaran mengenai situasi kebahasaan di Indonesia amat kompleks. Sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan dwibahasawan (bilingual), dan sebagian lainnya adalah masyarakat anekabahasawan (multilingual). Dalam kasus dwibahasawan atau kemampuan seseorang dalam menggunakan dua bahasa yang sama baiknya, pada umumnya masyarakat perkotaan menguasai dua bahasa. Sebagai contoh, di wilayah Sumatra Barat, misalnya di Kota Padang, bahasa Minangkabau dan bahasa Indonesia memiliki peran dan kedudukannya masing-masing sesuai dengan fungsinya. Dalam situasi formal pada ranah pemerintahan, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, sementara dalam situasi santai dan tidak formal – seperti misalnya di ruang-ruang umum terbuka seperti pasar dan pertemanan – umumnya digunakan bahasa Minangkabau sebagai media komunikasi antara penutur dan mitra tutur. Fenomena demikian dalam linguistik disebut sebagai masyarakat dwibahasawan dengan diglosia.

Ibrahim & Mayani (2018) menyebut ragam formal dengan varietas T (tinggi), sedangkan ragam informal dengan varietas R (rendah). Di DKI Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan, situasi diglosiknya berbeda dari situasi diglosik di daerah. Pada umumnya, kaum muda yang tinggal di Jakarta menggunakan dua varian bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia ragam formal dan bahasa Indonesia ragam kolokuiyal (Sneddon, 2003). Ragam informal atau kolokuiyal yang digunakan di ibukota dianggap lebih ‘bergengsi’ atau ‘berkelas’ dan karenanya banyak ditiru oleh anak-anak muda dari luar kota Jakarta.

2.2.2 Situasi Triglosik

Situasi kebahasaan di Indonesia juga dapat bersifat triglosik. Di Kalimantan Tengah, misalnya, orang-orang Dayak merupakan masyarakat anekabahasawan. Sebagian besar orang Dayak Ngaju menggunakan bahasa Banjar sebagai bahasa sehari-hari dalam interaksi tidak resmi seperti di ranah jual beli, sementara pada lingkup keluarga mereka menggunakan bahasa Dayak Ngaju. Namun di ranah pemerintahan atau ranah lainnya yang bersifat resmi, penutur Dayak Ngaju menggunakan bahasa Indonesia. Perbedaan fungsi-fungsi bahasa sebagaimana telah diuraikan di atas dalam kajian sosiolinguistik disebut sebagai *masyarakat triglosik atau triglosia*. Berikut gambaran masyarakat tutur dengan triglosia pada kasus Kalimantan Tengah.

Situasi triglosik digambarkan oleh Ibrahim & Mayani (2018) dengan satu bahasa yang merupakan varietas T (ragam formal) dan dua bahasa

lainnya yang merupakan varietas R (ragam informal). Pada situasi triglosik tersebut di atas, bahasa Melayu Tempatan dan bahasa etnik (bahasa daerah setempat) berfungsi sebagai lingua franca (Ravindranath & Cohn, 2014; Arka, 2013). Bahasa Melayu Tempatan adalah nama umum untuk Bahasa Melayu yang digunakan sesuai dengan nama daerahnya. Misalnya, Melayu Papua dituturkan di daerah Papua, Melayu Jambi digunakan oleh penutur dari Jambi, Melayu Ambon oleh penutur dari Ambon, dsb (Arka, 2013). Sebagai contoh, orang Papua yang tinggal di Manokwari menggunakan bahasa Indonesia dalam ranah formal. Bahasa Melayu Papua mereka gunakan sebagai bahasa sehari-hari, sedangkan bahasa etnik (misalnya bahasa Dani, bahasa Amber, dll) digunakan bila mereka berinteraksi dengan orang yang berbicara dalam bahasa daerah yang sama.

2.2.3 Dampak globalisasi pada situasi kebahasaan di Indonesia

Eksistensi sebuah bahasa sangat tergantung pada kekuatan bahasa tersebut. Hingga saat ini, bahasa yang menduduki peringkat tertinggi sebagai lingua franca di dunia adalah bahasa Inggris. Seperti yang disampaikan oleh Crystal (2003) dalam bukunya *English as a Global Language*, berkembangnya bahasa Inggris sebagai bahasa global tidak lepas dari adanya ekspansi kekuatan kolonial Inggris di akhir abad 19 dan kemudian diikuti dengan munculnya Amerika Serikat di abad 20 sebagai negara adidaya di bidang ekonomi.

Dampak penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa global ini berpengaruh pada dunia pendidikan di negara-negara yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris. Misalnya, di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, bahasa Inggris diajarkan sebagai bahasa asing di sekolah-sekolah. Banyak sekolah, khususnya di kota-kota besar, yang menawarkan kurikulum yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya (*English as a Medium of Instruction* atau EMI).

Dari waktu ke waktu, bahasa Inggris telah berkembang menjadi bahasa yang banyak digunakan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dianggap penting untuk dikuasai. Selain itu, biasanya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan akan terbuka lebih lebar bagi mereka yang menguasai bahasa ini dengan baik. Dampak dari situasi ini membuat banyak orang yang berpendapat bahwa penguasaan bahasa Inggris jauh lebih penting daripada penguasaan bahasa Indonesia atau bahasa daerah.

Di sisi lain, banyak orang tua tidak mewariskan bahasa ibunya kepada anak-anaknya karena mereka berpendapat bahwa bahasa daerah tidak memiliki fungsi penting untuk masa depan anak-anak mereka. Di ranah keluarga, alih-alih menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi, komunikasi antaranggota keluarga cenderung dilakukan dalam bahasa Indonesia ketimbang bahasa daerah. Yang lebih memprihatinkan, sebagian keluarga yang tingkat sosial-ekonominya tinggi (biasanya mereka tinggal di kota-kota besar) menganggap bahwa bahasa Inggris jauh lebih penting daripada bahasa Indonesia, sehingga di ranah keluarga pun, mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi sehari-hari. Akibatnya, anak-anak di keluarga tipe ini lebih fasih berbicara dalam bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia, walaupun mereka lahir dan besar di Indonesia (Onishi, 2010; Urip, 2015; Basuningtyas, 2014). Kesimpulannya, dampak globalisasi membuat adanya situasi kebahasaan yang berbeda dari beberapa situasi kebahasaan yang telah disebutkan di atas.

2.2.4 Pelindungan Bahasa-Bahasa Daerah

Terdapat begitu banyak pertanyaan kritis dari para pemerhati bahasa di dunia, terkait dengan upaya revitalisasi maupun konservasi bahasa di dunia sebagaimana pertanyaan “Apakah bahasa sekarat layak diselamatkan?” Pertanyaan ini termuat dalam sebuah artikel berbahasa Rusia dengan judul “Situasi Bahasa di Dunia” dalam jurnal *Centre for Socio-Cognitive Discourse Studies at Moscow State Linguistic University* 2016. Lebih lanjut penulis dalam makalah tersebut menanyakan apakah kita layak mempertahankan sebuah dialek yang hidup yang terkadang hanya dituturkan oleh hanya segelintir orang? (<http://scodis.com/for-students/linguarium/language-situation-in-the-world/>).

Pertanyaan lainnya datang dari Lane Wallace dalam judul artikelnya “Apa yang Hilang Saat Sebuah Bahasa Mati” dalam jurnal *The Atlantic* terbitan November 11, 2009. Menjawab pertanyaan Wallace tersebut Lyle Campbell seorang linguis Amerika yang juga merupakan direktur Pusat Studi Universitas pada Bahasa-bahasa Indian Amerika mengatakan bahwa “Once a language dies, the knowledge dies with it” ‘ketika bahasa hilang, sebagian besar pengetahuan yang menyertainya hilang’. (<https://www.theatlantic.com/national/archive/2009/11/whats-lost-when-a-language-dies/29886/>). Bahkan Samuel Johnson secara lebih tegas menyatakan, bahwa *Language is the Garment of Thought* ‘Bahasa adalah pakaian pemikiran’, yang ia tuliskan dalam sebuah jurnal *Interdisciplinary Studies of Literature* / Vol. 1, No. 3, Sept., 2017.

Dari dua pertanyaan kritis sekaligus jawaban di atas, jelas sekali bahwa bahasa merupakan bagian terpenting dari ilmu pengetahuan, sehingga dengan mempertahankan bahasa, maka sejatinya kita telah mempertahankan sebagian ilmu pengetahuan. Dalam konteks ke-Indonesiaan, bahasa adalah identitas suatu bangsa yang terangkum dalam sebuah ungkapan Melayu “Pupus bahasa pupuslah bangsa”. Dari sini jelas sekali, bahwa bahasa menjadi identitas dari sebuah bangsa. Seseorang dikenal identitasnya dari bahasa yang digunakannya. Jika hilang bahasanya, hilang jugalah identitas bangsanya. Dengan demikian, upaya revitalisasi maupun konservasi merupakan ikhtiar Badan Bahasa sebagai garda terdepan lembaga kebahasaan dalam menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Pasal 31).

2. 3 Tantangan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah

Program revitalisasi bahasa yang baik sangat bergantung dari sejauh mana kita dapat melihat dan mempertimbangkan berbagai faktor yang menjadi pemicu seorang individu dalam sebuah komunitas untuk dapat memilih bahasa apa yang akan mereka gunakan. Dengan demikian, dibutuhkan pemahaman yang menyeluruh terhadap situasi kebinekaan yang ada dalam suatu masyarakat bahasa untuk melihat bagaimana sikap bahasa penutur dan bagaimana posisi bahasa tersebut di kalangan komunitasnya sendiri. Oleh karena itu, pada dasarnya dapat pula dikatakan bahwa terkadang sebuah program revitalisasi dari satu bahasa di satu daerah belum tentu dapat diaplikasikan pula untuk bahasa lain di daerah yang lain. Hal tersebut menjadi sulit karena dalam merancang sebuah program revitalisasi, perlu dilakukan berbagai pendekatan untuk mengetahui kondisi sosial, budaya, dan sikap bahasa dari penutur bahasa tersebut.

Pada hakikatnya, tujuan utama dari sebuah tindak revitalisasi adalah untuk mengembalikan bahasa dan/atau budaya ke posisi awalnya. Revitalisasi ini seringkali dikembangkan oleh linguist atau para pemerhati budaya, pemerintah, atau bahkan penutur bahasa itu dan pemilik kebudayaan tersebut. Namun, sebagian dari strategi ini bertujuan untuk menjadikan bahasa yang terancam menjadi bahasa yang memiliki daya tarik dan berguna untuk penggunaannya, yang akhirnya terjadi transformasi pada bahasa yang terancam tersebut dan bukan mengembalikan ke fungsi awalnya.

Pedoman ini diharapkan dapat merefleksikan isu-isu ini: Tantangan apa yang dihadapi bahasa-bahasa yang direvitalisasi saat ini dan apa bedanya dengan tantangan yang dihadapi oleh bahasa-bahasa yang terancam punah? Seberapa realistisnya kesempatan untuk mengembalikan sebuah bahasa yang terancam punah pada ranah asalnya (khususnya ketika, bagi alasan pragmatik, kampanye revitalisasi cenderung berfokus pada ranah di luar rumah dibandingkan ranah di dalam rumah)? Apa konsekuensi revitalisasi bahasa dikaitkan dengan struktur linguistik dari ragam bahasa yang direvitalisasi? Seberapa jauh “penutur baru” dalam komunitas wicara suatu bahasa yang direvitalisasi juga menjadi pelaku perubahan linguistik? Sanggupkah perencanaan korpus secara menyeluruh mencegah hasil linguistik yang terjadi dari interaksi yang kuat dengan bahasa dominan? Apakah perencanaan bahasa nantinya akan memulihkan komunitas wicara atau mentransformasinya? Apakah “penutur baru” merasa janggal dengan penutur ‘tradisional’ dikaitkan dengan lokasi geografis mereka, latar belakang sosial mereka, keaslian ragam yang mereka tuturkan dan bahkan alasan untuk menuturkannya? – dan apakah revitalisasi ini kemudian menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan?

Banyak gerakan revitalisasi bahasa di dunia masih berada di tahap awal dalam pengembangannya (khususnya bila revitalisasi dipandang sebagai suatu proyek yang berlangsung pada beberapa generasi). Bruce (1999) mengatakan bahwa kelompok-kelompok seperti para rohaniawan cenderung mengembangkan dengan cara yang dapat diprediksi, mirip dengan tahap pengembangan yang ditemukan pada pemerolehan bahasa (Lightbown and Spada 2006). Ada juga beberapa faktor yang diidentifikasi dalam pengembangan upaya revitalisasi, misalnya kecenderungan untuk fokus pada pengenalan bahasa minoritas di sekolah, walaupun bukti penelitian menunjukkan bahwa upaya ini bukanlah strategi yang paling efektif, dibandingkan dengan peningkatan upaya penuturan bahasa di rumah. Bagi komunitas dan aktivis jauh lebih mudah mengkampanyekan untuk mengganti kurikulum sekolah dibandingkan dengan mengganti cara mereka dan cara tetangga mereka menggunakan bahasa.

Walaupun demikian, yang menjadi prinsip bagi upaya revitalisasi bahasa yaitu diarahkannya tujuan pada pemulihan vitalitas bahasa yang sebenarnya, yakni memperkenalkan kembali bahasa pada anak-anak di rumah. Hal ini dikaitkan dengan besarnya pengaruh Joshua Fishman, seorang tokoh kunci dalam bidang ini (1991, 2001). Romaine (2006) menyatakan bahwa, seperti pernyataan di atas, umumnya upaya revitalisasi pada masa kini tidak mengikuti anjuran Fishman untuk pertama kali fokus pada keluarga, namun langsung pada perluasan ranah, pendidikan formal, dsbnya. Fishman juga mengetahui hal ini:

Jauh lebih mudah untuk berpusat pada tahap-tahap lebih tinggi [dari skala vitalitas bahasanya, seperti pendidikan]. Namun tahap-tahap ini dicirikan oleh dua kekurangan yang dikesampingkan. . . (a) dihapus, sebagaimana adanya, dari inti utama yang aktual dari peralihan [bahasa-daerah], dan (b) tahap-tahap ini sungguh langsung menuju ke ketergantungan yang meningkat pada, konfrontasi dengan atau persaingan dengan bahasa-dalam-budaya yang dominan. . . Penekanan pada prioritas yang salah merupakan suatu contoh yang sangat mahal dari kurangnya suatu teori sosial atau model yang sesuai dari apa yang RLS [*reversing language shift*/ pengembalian pergeseran bahasa] perlukan. (1991: 112-13)

Grenoble dan Whaley (2006: 21) membagi revitalisasi ke dalam dua kategori, yaitu di level makro dan di level mikro. Revitalisasi pada level makro biasanya berhubungan dengan hukum, situasi politik, kebijakan, dan lain-lain yang biasanya berlaku pada tingkat nasional. Dengan demikian, hal ini juga secara otomatis termasuk di dalamnya dukungan pemerintah terhadap bahasa lokal, perencanaan bahasa di tingkat nasional, tujuan pendidikan (seperti pendidikan bilingual dan pendidikan dasar berbasis bahasa ibu), serta situasi bilingual dan multilingual di negara/wilayah tersebut. Dapat pula dikatakan bahwa level makro ini berada di luar kendali komunitas lokal, namun dampak dari kebijakan ini perlu diketahui lebih dulu sebelum mulai diimplementasikan pada masyarakat bahasa. Di sisi lain, revitalisasi pada level mikro melibatkan demografi, sikap bahasa, kegiatan budaya, serta situasi kebahasaan yang ada pada komunitas bahasa lokal. Dengan demikian, penting untuk diketahui apakah komunitas bahasa itu tinggal berdekatan dengan komunitas bahasa yang lain sehingga memunculkan adanya kontak bahasa yang intens? Selain itu, dapat juga dilihat bagaimana kesempatan pendidikan yang mereka miliki? Sejauh mana mereka memiliki kesempatan menggunakan bahasa mereka sendiri?

Ada empat langkah yang dapat dilakukan dalam sebuah perencanaan bahasa menurut Kaplan dan Baldauf (1998). Langkah-langkah tersebut mencakup beberapa hal berikut ini.

1. Perencanaan Korpus

Perencanaan ini sangat erat kaitannya dengan dokumentasi bahasa karena hal ini berkaitan dengan material data yang dikumpulkan. Data-data yang berhasil didokumentasikan nantinya dapat berperan penting

dalam penyediaan *evidence based-corpora* untuk kemudian digunakan dalam penyusunan kamus, materi pengajaran bahasa, serta tata bahasa. Tentu saja hal ini yang menjadi penopang utama untuk perencanaan bahasa-dalam-pendidikan nantinya. Ada beberapa hal yang kemudian diperkenalkan juga pada kegiatan perencanaan korpus ini, yaitu konsep standardisasi dan ortografi untuk bahasa minoritas. Hal ini kemudian tentunya akan menghadirkan sebuah permasalahan baru yang dilematis. Ada banyak bahasa di NKRI ini yang memiliki banyak dialek dan yang tidak memiliki. Akan sangat sulit menerapkan konsep standardisasi untuk bahasa yang memiliki banyak dialek.

2. Perencanaan Status

Perencanaan status ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang ditetapkan melalui UU No. 24 tahun 2009 pasal 42.

- (1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
- (2) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (3) tersebut adalah PP 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Di dalam PP tersebut dinyatakan bahwa Pelindungan Bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya. Kemudian, dasar hukum ini masih diperkuat lagi dengan UU Pemajuan Kebudayaan yang memasukkan bahasa sebagai bagian dari Objek Pemajuan Kebudayaan. UU Pemajuan Kebudayaan mengakui dan menghargai keragaman budaya Indonesia, menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan, serta menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional. Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa pada dasarnya Pemerintah Republik Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang cukup, salah satunya untuk pelestarian bahasa-bahasa daerah.

3. Perencanaan Bahasa-dalam-Pendidikan (atau disebut juga Perencanaan Pemerolehan Bahasa)

Dari beberapa uraian pada bagian awal tulisan ini dijelaskan bahwa salah satu yang menyebabkan terjadinya pergeseran bahasa adalah adanya interferensi dari luar, yaitu pihak pengelola pendidikan, dalam hal ini guru dan sekolah. Jika memang tidak ada tempat bagi bahasa daerah, dalam sistem pendidikan formal, kiranya pemerintah dapat memberikan tempat dalam pendidikan informal, di luar jam sekolah misalnya, atau dengan memberikan kebebasan pada pihak sekolah untuk mengatur mengenai hal ini. Perencanaan ini juga dikenal sebagai perencanaan pemerolehan bahasa dan di dalamnya termasuk media pendidikan untuk bahasa daerah. Kemudian, pengajaran bahasa daerah sebagai bahasa kedua, revitalisasi atau pelestarian bahasa-bahasa yang terancam punah melalui pengajaran yang formal atau informal, baik untuk anak-anak ataupun orang dewasa.

Meskipun demikian, ada beberapa isu yang masih perlu didiskusikan bersama sebelum memulai perencanaan pemerolehan bahasa ini. Beberapa hal di antaranya adalah bahasa apa yang akan diajarkan? Jika bahasa tersebut memiliki banyak dialek, dialek mana yang kemudian akan dipilih untuk diajarkan? Apakah diajarkan satu dialek saja ataukah diajarkan beberapa dialek sekaligus? Kemudian, di usia berapa sebaiknya pengajaran ini dimulai? Pelatihan guru, metode pengajaran, sumber dan materi, siapa yang menentukan kurikulum? Apakah perlu diadakan ortografi yang standar? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui diskusi-diskusi dan studi-studi berdasarkan hasil riset yang sudah dilakukan oleh pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya.

4. Perencanaan prestise

Jenis perencanaan ini mempromosikan pandangan yang positif terhadap bahasa, keragaman linguistik, praktik multilingualisme. Linguis sudah lama mengetahui keuntungan kognitif dari multilingualisme dan pendidikan berbahasa ibu, namun lemah dalam mempublikasikannya. Sikap bahasa merupakan kunci dalam pelestarian bahasa. Kita harus melawan sikap bahasa yang negatif dan ideologi yang merosot. Hal ini vital bila penerapannya berhasil. Contohnya, bahasa Irlandia (Fennell, 1981; Cooper, 1989)

Berdasarkan penjelasan tersebut, aksi kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra daerah ini kemudian dapat terbagi atas tiga model, yaitu sebagai berikut.

a) Revitalisasi berbasis masyarakat (keluarga)

Model revitalisasi ini menekankan pada peningkatan penguasaan masyarakat terhadap bahasa dan sastra daerah melalui lingkungan rumah tangga. Aksi

dipusatkan pada lingkup desa, kelurahan, atau kecamatan. Peserta kegiatan revitalisasi model ini adalah perseorangan ataupun kelompok sebagai kader bahasa dan sastra daerah dalam ranah keluarga.

b) Revitalisasi berbasis pendidikan (sekolah)

Model revitalisasi ini mengarah pada peningkatan penguasaan bahasa dan sastra daerah melalui ranah pendidikan, baik sebagai muatan lokal maupun ekstrakurikuler. Peserta kegiatan revitalisasi model ini adalah siswa sekolah.

c) Revitalisasi berbasis komunitas

Model revitalisasi ini menekankan pada peningkatan penguasaan bahasa dan sastra daerah melalui komunitas, seperti kelompok kesenian atau kelompok pecinta bahasa dan sastra daerah. Peserta kegiatan revitalisasi model ini adalah anggota komunitas.

2.4. Praktik Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah Selama Ini

Selama ini ada beberapa pihak yang terlibat dalam kajian-kajian atas bahasa-bahasa daerah di Indonesia, yaitu Badan Bahasa dari Kemdikbud, LIPI dari BRIN, dan universitas-universitas di Indonesia. Namun perlu diakui bahwa tidak terlalu banyak riset yang berfokus pada bahasa-bahasa dengan jumlah penutur yang sedikit yang dilakukan oleh peneliti Indonesia. Sebagian besar kajian yang ada dilakukan oleh lembaga-lembaga riset asing, seperti Max Planck Institute di Jerman, Summer Institute of Linguistics (SIL) di Amerika, Endangered Language Development Program (ELDP) di Inggris, dan Linguistics Dynamics Sciences (LingDy) di Tokyo, Jepang. Sejauh ini, kajian-kajian tentang kepunahan bahasa di Indonesia yang dilakukan lembaga pemerintahan seperti Badan Bahasa dan LIPI masih dilakukan menggunakan kerangka pendekatan dari UNESCO.

Kebutuhan akan adanya kegiatan yang bersifat pengembangan kapasitas berbasis komunitas belakangan ini mulai marak dikaji di kalangan pegiat revitalisasi dan akademisi di dunia. Di Indonesia sendiri pada dasarnya ada beberapa hal berbeda yang dapat dibandingkan antara kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pihak nonpemerintah. Untuk melakukan praktik perlindungan bahasa daerah ini, balai dan kantor bahasa di Indonesia juga sudah melakukan beberapa kegiatan yang di antaranya adalah sebagai berikut.

Dalam upaya perlindungan bahasa dan sastra daerah untuk Model B, Balai dan Kantor Bahasa di tiga lokasi yaitu di Provinsi Sumatra Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan telah dilakukan berbagai praktik baik, antara lain:

- 1) Penerjemahan karya-karya sastra daerah dari bahasa Pakpak, Simalungun, Nias, Samosir, dan Angkola-Mandailing ke dalam bahasa Indonesia dan Inggris (Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara);
- 2) Penerbitan buku-buku pelajaran muatan lokal tematik terpadu dalam Bahasa Batak Toba, Melayu Langkat, dan Angkola-Mandailing (Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara);
- 3) Penerbitan buku-buku pelajaran muatan lokal bahasa Samawa, (Kantor Bahasa Provinsi NTB);
- 4) Pembelajaran Bahasa Sasak untuk siswa sekolah dasar kelas 1-6 di Kota Mataram (Kantor Bahasa Provinsi NTB);
- 5) Diseminasi Model Pembelajaran Bahasa dan sastra di sekolah dasar dan menengah Provinsi Sulawesi Selatan (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan).

Selain produk bahasa dan sastra di atas, Badan Bahasa juga telah mengadakan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) yang mendapatkan sambutan yang luar biasa dari sekolah-sekolah di mana wilayahnya menjadi target revitalisasi bahasa. Agar karya bahasa dan sastra yang telah dihasilkan Balai dan Kantor Bahasa tersebut tidak sia-sia, maka berbagai upaya lanjutan perlu disinergikan dengan yang sudah ada agar revitalisasi bahasa dan sastra ini dapat mencapai hasil yang optimal.

Namun, seperti telah disampaikan di atas, revitalisasi tidak akan berhasil jika hanya ada satu pihak saja yang aktif. Generasi muda saat ini adalah generasi milenial yang menginginkan hal-hal yang baru, menarik, dan dinamis. Oleh karena itu, khusus untuk bahasa-bahasa yang termasuk dalam Model B ini, pendekatan baru perlindungan bahasa dan sastra daerah perlu diperkenalkan kepada masyarakat, khususnya sekolah yang menjadi basis kegiatan ini.

Praktik perlindungan bahasa daerah yang dilakukan di wilayah Indonesia timur pada umumnya dilakukan dengan pengembangan komunitas dan kegiatan berbasis kelompok penutur. Untuk bahasa-bahasa dengan jumlah penutur yang sedikit, tidak jarang pula dilakukan kegiatan yang berbasis keluarga atau perorangan. Kegiatan seperti ini, seringkali juga digagas oleh lembaga keagamaan, seperti lembaga gereja, misalnya yang terjadi di banyak komunitas penutur di wilayah Papua dan Papua Barat

melalui proses penerjemahan Alkitab. Selain itu, di bahasa yang agak banyak penuturnya, seperti di Ternate, Maluku Utara, praktik baik revitalisasi ini juga ada yang dilakukan melalui proses pembelajaran berbasis komunitas. Salah satu di antaranya adalah kelas bahasa Ternate yang digagas oleh komunitas Jarkot (Jaringan Komunitas Ternate) di Benteng Oranje. Bahkan, komunitas ini pun sudah mulai menggunakan ranah digital, seperti media sosial Facebook dan Instagram, untuk melakukan kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra Ternate.

Adapun pendanaan dari berbagai program tersebut diperoleh dari beberapa sumber. Sumber yang paling banyak sejauh ini adalah pendanaan yang berasal dari anggaran pemerintah. Ada juga kerja sama yang dilakukan sebagai kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ataupun dinas pendidikan. Kemudian, ada pula yang program revitalisasi yang dilakukan menggunakan dana dari riset universitas (terutama untuk program revitalisasi yang merupakan kerja sama antar universitas dengan lembaga lain), baik dari kampus dalam negeri, maupun kampus di luar negeri. Di beberapa tempat, salah satunya di wilayah Pagu, Halmahera Utara, pihak adat dan pemerintahan desa sudah melakukan kerja sama dengan pihak lain, seperti perusahaan tambang yang ada di sekitar area mereka. Kerja sama tersebut dilakukan untuk pendirian semacam rumah budaya untuk pelestarian bahasa dan tradisi lisan di wilayah Pagu. Freeport di Papua menyediakan dana yang tidak kecil setiap tahunnya untuk beberapa komunitas bahasa yang ada di sekitar pertambangan mereka demi peningkatan pendidikan dan kebahasaan. Di samping itu, untuk bahasa dengan jumlah penutur yang kecil, tidak jarang juga ditemukan kegiatan revitalisasi berbasis masyarakat yang sifatnya lebih mandiri, yaitu menggunakan pendanaan dari LSM atau bahkan swadaya dari masyarakat penutur itu sendiri.



BAB III

PENDEKATAN BARU PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH MODEL B

3.1 Konsep Dasar Revitalisasi Bahasa Model B

Bahasa dan sastra daerah merupakan milik masyarakat setempat di mana bahasa menjadi alat komunikasi sehari-hari dan sastra adalah karya yang berkembang di masyarakat dengan menggunakan bahasa setempat. Bahasa dan sastra daerah yang ada di bumi Indonesia merupakan kekayaan kultural bangsa yang sangat membanggakan karena di dalamnya terkandung kearifan lokal sehingga keduanya perlu dijaga, dilindungi, dan dilestarikan.

Dalam upaya untuk melindungi bahasa dan sastra daerah yang ada di seluruh Nusantara, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) yang merupakan representasi pemerintah menyediakan prasarana perlindungan terhadap bahasa dan sastra daerah tersebut. Usaha perlindungan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (UU RI No. 24/2009) dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 (PP No. 57/2014).

Menyambung kegiatan revitalisasi yang telah diujicobakan pada enam bahasa daerah pada tahun 2021 - yaitu bahasa Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Bugis, dan Toraja - pada tahun 2022 ini Badan Bahasa memperluas jangkauan revitalisasi ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Kegiatan ini dilakukan agar bahasa-bahasa daerah yang ada di Nusantara ini tidak hanya menjadi milik penutur yang sudah lanjut usia saja, akan tetapi kalangan muda juga mau menggunakan bahasa daerahnya. Dalam hal ini, penutur muda diharapkan dapat meningkatkan penggunaan bahasa daerahnya di berbagai ranah, antara lain di ranah keluarga, sekolah, keluarga, pertemanan, dan sebagainya.

Seperti yang telah disampaikan pada Bab 2 (Situasi Kebahasaan di Indonesia), ada cukup banyak bahasa daerah yang perlu mendapatkan

perhatian khusus karena bahasa-bahasa tersebut dalam posisi yang terancam atau hampir punah. Situasi ini terjadi karena saat ini banyak anak muda yang tidak lagi dapat berbicara dalam bahasa daerahnya.

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, Badan Bahasa telah melakukan beberapa upaya perlindungan terhadap bahasa dan sastra daerah di seluruh Nusantara. Kegiatan yang bersifat nasional seperti pemilihan Duta Bahasa, Festival Tunas Bahasa Ibu, kegiatan penelitian kebahasaan yang dilakukan oleh para peneliti di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia, serta berbagai kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat penutur bahasa daerah menunjukkan bahwa Badan Bahasa ingin melibatkan kaum muda untuk menjadi pelopor dan teladan bagi generasi muda untuk aktif menggunakan bahasa daerah dalam upaya untuk melestarikan bahasa daerah tersebut.

Namun demikian, upaya revitalisasi ini bukanlah hal yang mudah. Revitalisasi adalah sebuah proses yang dinamis yang – jika ingin berhasil – harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait secara bersama-sama dengan komitmen yang tinggi. Grenoble (2021) mengatakan bahwa revitalisasi akan berhasil jika masyarakat merasa diuntungkan dengan revitalisasi tersebut. Selanjutnya, dikatakannya bahwa revitalisasi adalah transformasi sosial, yang tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga komunitas pengguna bahasa.

Dalam konteks bahasa dan sastra daerah Model B yang akan direvitalisasi pada tahun 2022 ini, kaum muda di wilayah-wilayah sasaran pada umumnya tidak dapat berkomunikasi lagi dalam bahasa daerah mereka. Mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu Tempatan (Ibrahim, 2020) sebagai alat komunikasi sehari-hari.

Agar hasil revitalisasi ini efektif, kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam lingkungan sekolah saja, tetapi juga di luar lingkungan sekolah yang antara lain dapat melibatkan komunitas, antara lain orang tua, pemangku adat, penggerak bahasa, pelaku seni budaya, dan sebagainya. Apa yang telah dilakukan pada uji coba revitalisasi bahasa dan sastra daerah pada 2021 sudah sangat baik dan mendapatkan respon yang sangat positif dari berbagai pihak. Siswa SD dan SMP yang terlibat dalam berbagai lomba dan festival juga sangat antusias mengikutinya.

Agar program revitalisasi ini menjadi program yang menarik dan berkelanjutan, perlu ada pendekatan-pendekatan baru yang dapat dilakukan pada tahun 2022. Bab ini khusus membahas revitalisasi bahasa dan sastra daerah untuk Model B, yaitu bahasa-bahasa yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

- 1) Beberapa bahasa relatif aman tetapi ada yang mengalami kemunduran.
- 2) Beberapa bahasa cukup dominan.
- 3) Beberapa bahasa dituturkan secara alamiah dan yang lainnya terstruktur.

Agar pendekatan baru perlindungan melalui pengembangan dapat diukur keberhasilannya, perlu dilihat lima variabel penyusun indikator sebagai berikut.

1) Bahasa Daerah

Peneliti bahasa, baik yang berasal dari internal Badan Bahasa, Balai Bahasa, Kantor Bahasa, maupun dari mitra seperti lembaga kampus atau lembaga nirlaba, perlu mengidentifikasi terlebih dahulu jumlah bahasa yang ada di daerah tersebut, dan selanjutnya mengamati ada berapa bahasa daerah yang telah dimasukkan dalam muatan lokal di sekolah.

2) Jumlah Penutur

Selain mengidentifikasi jumlah bahasa daerah, perlu juga diidentifikasi jumlah penutur melalui berbagai sumber di suatu wilayah yang akan diterapkan sebagai wilayah tempat pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah dan sastra. Selain itu, penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah perlu dipetakan, seperti ranah pemerintahan, pendidikan, keagamaan, dan keluarga. Dari sini akan diketahui sejauh mana ketahanan bahasa daerah di tempat tersebut dan akan menjadi landasan dalam melakukan revitalisasi.

3) Jumlah Guru Bahasa Daerah

Ketersediaan jumlah guru bahasa daerah objek program revitalisasi bahasa daerah dan sastra akan dilaksanakan juga perlu dilakukan sebagai upaya dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan program tersebut. Guru-guru bahasa daerah itu diharapkan dapat menjadi guru master yang dapat melatih guru-guru lainnya.

4) Media

Jumlah media penyiaran elektronik yang memiliki program dalam bahasa daerah (radio, TV, siniar/*podcast*, atau kanal Youtube) perlu diidentifikasi karena akan menjadi salah satu penentu dalam suksesnya pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah dan sastra.

5) Publikasi

Perlu pula diidentifikasi jumlah publikasi cetak maupun digital dalam bahasa daerah, baik karya sastra maupun nonsastra (koran, majalah, buletin, atau sejenisnya).

3.2. Kurikulum/Materi Revitalisasi Model B

Pada tahun 2021, sudah ada tujuh materi revitalisasi yang dimasukkan sebagai pengayaan kurikulum bahasa dan sastra daerah, yaitu:

1. membaca dan menulis aksara daerah;
2. menulis cerita pendek;
3. membaca dan menulis puisi;
4. mendengarkan;
5. berpidato;
6. tembang tradisi (pupuh, macapat); dan
7. *stand-up comedy* (borangan).

Tujuh materi revitalisasi tersebut di atas masih tetap dapat dimasukkan dalam kurikulum karena sudah terbukti dapat meningkatkan antusiasme anak-anak sekolah untuk menggunakan bahasa daerahnya. Akan tetapi, agar pembelajaran bahasa dan sastra daerah dapat betul-betul efektif, siswa harus mempunyai pengalaman belajar yang otentik (*authentic experiential learning*). Pembelajaran yang berbasis pengalaman otentik akan membekas di hati para siswa, dan dengan demikian akan membangkitkan semangat mereka untuk menggunakan bahasa daerah. Dengan demikian, siswa tidak hanya mengalami pembelajaran di dalam kelas saja, tetapi juga di luar kelas agar mereka dapat berinteraksi dalam bahasa daerah secara langsung dengan komunitas tutur atau pelaku seni dan budaya.

Beberapa pendekatan baru dapat ditambahkan untuk memperkaya materi revitalisasi yang sudah ada. Selain itu, dalam rangka menunjang program MBKM yang dicanangkan oleh Kemendikbud, program perlindungan bahasa daerah sebagai salah satu prioritas merdeka belajar dapat melibatkan perguruan tinggi. Balai dan Kantor Bahasa dapat bekerja sama dengan universitas setempat untuk menyukseskan program revitalisasi ini. Komunitas atau perorangan di luar universitas atau lembaga juga dapat diajak untuk bekerja sama. Berikut beberapa usulan pendekatan baru yang dapat dilakukan terkait upaya perlindungan bahasa dan sastra daerah untuk Model B.

3.2.1 Pembelajaran Berbasis Pencelupan (*Immersion program*)

Program ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkomunikasi hanya dalam bahasa daerah selama waktu tertentu. Sekelompok siswa tinggal di suatu tempat bersama guru atau instruktur (yang adalah penutur jati bahasa daerah) selama periode waktu tertentu. Berbagai kegiatan dapat dirancang agar siswa dapat mempraktik dalam bahasa daerah secara langsung. Untuk menarik minat peserta, lokasi pencelupan ini dapat diberi nama, misalnya *Kampung Sasak*, *Kampung Mbojo*, *Kampung Toraja*, *Kampung Batak Angkola*, dsb.

3.2.2 Pembelajaran Berbasis Praktik Satu Hari Berbahasa Daerah (*One-day Language Practice*)

Pembelajaran berbasis praktik satu hari berbahasa daerah ini dapat dilakukan dengan cara-cara berikut.

- 1) Sekolah dapat menentukan satu hari khusus di mana para guru dan siswa diwajibkan menggunakan bahasa daerah pada saat mereka berinteraksi di luar kelas, misalnya pada jam-jam istirahat.
- 2) Sekolah dapat menentukan waktu tertentu pada hari tertentu (misalnya setiap hari Rabu, pukul 09.00-10.00). Para siswa bertemu dan memamerkan karya mereka yang ditulis dan disampaikan dalam bahasa daerah. Karya siswa itu dapat dilombakan dan kemudian ditentukan pemenangnya.

3.2.3 Pembelajaran Berbasis Teknologi

Di era serba digital ini, terjadi perubahan pola dalam berbagai bidang kehidupan yang bersifat desruptif, mulai dari perilaku berbisnis, interaksi sosial, hingga proses pembelajaran di dunia pendidikan. Dalam proses pembelajaran dunia pendidikan, khususnya pada pembelajaran bahasa daerah misalnya, pembelajar dituntut untuk kreatif dalam memformulasikan strategi-strategi pengajaran yang relevan dengan tuntutan zaman. Kecanggihan teknologi yang tersedia menjadi media yang dapat mendukung dalam mengembangkan kesuksesan pembelajar dalam memperoleh ilmu pengetahuan secara praktis dan efisien. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa dan sastra daerah yaitu dengan menggunakan pembelajaran campuran atau *blended learning*. Pembelajaran campuran mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang sesuai bagi kebutuhan siswa atau mahasiswa.

Beberapa macam aplikasi yang ditawarkan yang kontekstual untuk digunakan dalam pembelajaran bahasa dan sastra daerah. Para guru atau dosen bebas memilih dan berkreasi menyesuaikan dengan beragam aplikasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Beberapa aplikasi yang selama ini telah digunakan dalam proses belajar mengajar dalam lingkup pendidikan kita antara lain. Kahoot, Edmodo, Zenius, Google Classroom, Powtoon, Google Jumbord dan Hot Potatoes dan banyak lagi aplikasi yang terus menerus dikembangkan.

Dalam penggunaan aplikasi Kahoot misalnya, salah satu aplikasi yang berbasis permainan. Dengan menguasai aplikasi ini, seorang pembelajar dapat merancang permainan berupa kuis pada pelaksanaan pembelajaran bahasa dan sastra daerah, baik berupa identifikasi gambar, menghafal kosakata, menebak kata, lewat gambar-gambar yang tersedia. Aplikasi Kahoot yang berbasis permainan dapat memancing siswa untuk terlibat aktif. Lewat aplikasi Kahoot pembelajaran tidak lagi monoton.

Selain aplikais ini efektif pada aspek pengajaran pada sisi lain aplikasi ini juga digratiskan selama masa pandemi. Aplikasi lain seperti Edmodo Zenius, Google Classroom, Powtoon, Google Jumbord, dan Hot Potatoes dapat juga digunakan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan para pembelajar.

3.2.4 Pembelajaran Berbasis Keagamaan

Menurut Fishman (1965:73) terdapat lima domain, yaitu keluarga, persahabatan, agama, pendidikan dan pekerjaan. Selain ranah pendidikan sebagai media kegiatan pembelajaran untuk model B juga dapat dilakukan yaitu pembelajaran berbasis keagamaan. Konsep ini dimungkinkan untuk dilakukan di wilayah Sumut, Nusa Tenggara Barat, maupun Sulawesi yang sosial kulturalnya cukup dekat dengan suasana keagamaan. Penguatan bahasa daerah melalui ranah keagamaan ini bersandar pada keselarasan bahasa yang digunakan antara penutur dan mitra tutur agar para jamaah mudah menyerap pesan yang disampaikan. Pada sisi lain, tauladan para jamaah di lingkungan keagamaan adalah pemimpin agama, sehingga apa yang dilakukan oleh para pemimpin agama, hal itu pula yang akan dilakukan oleh para jamaah. Melalui para dai merupakan upaya yang tepat dalam menyampaikan himbauan agar tetap menjaga dan merawat kebudayaan seperti bahasa daerah dan sastra dalam upaya menguatkan nilai-nilai keagamaan, seperti yang dilakukan oleh para penziar agama pada masa lalu.

Teknis pelaksanaan penguatan bahasa daerah dan sastra di ranah keagamaan ini sebagai berikut.

1. Perevitalisasi merumuskan sebuah konsep lingkungan kebahasaan pada ranah keagamaan, sebagai upaya untuk menciptakan nuansa alami dengan harapan para pelaku keagamaan menyerap aspek-aspek di lingkungan yang diciptakan tersebut dan dapat diekspresikan dalam setiap kegiatan keagamaan.
2. Perevitalisasi dapat memulai koordinasi dengan pihak-pihak da'i atau penceramah agama keagamaan melalui ketua organisasi keagamaan seperti MUI, KGE, Oikumene, Walubi dst. organisasi yang menaungi para penceramah keagamaan baik di ruang privat dan publik.
3. Selain berkoordinasi dengan pihak ketua organisasi keagamaan perevitalisasi juga dapat melakukan pendekatan dengan para ketua pelaksana lomba tahunan keagamaan seperti MTQ, Preswarawi, Utsawa Dharma Gita, dst. Gara dalam setiap perlombaan tersebut dapat memasukkan unsur-unsur bahasa dan sastra daerah dalam kegiatan lomba tersebut. Pada lomba baca kitab suci Al-Quran misalnya terjemahan atau sari tilawah menggunakan bahasa daerah demikian halnya pada lomba-lomba keagamaan lainnya.
4. Memberikan pelatihan kepada para pemimpin agama seperti ustazg, pastor, biksu yang berkecimpung dalam menyampaikan pesan keagamaan di masjid, gereja vihara dst, untuk selanjutnya dapat dipraktekkan dalam kegiatan keagamaan .
5. Memberikan penghargaan bagi para pemimpin agama atau pengurus tempat kegiatan ibadah yang telah secara konsisten melaksanakan program-program pelestarian kebahasaan dan kesastraan di wilayah masing-masing.

3.2.5. Pembelajaran Berbasis Seni dan Budaya

Kurikulum berbasis seni-budaya dapat dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Jika diadakan di dalam kelas, sekolah dapat mengundang penggerak bahasa daerah atau pelaku seni budaya dan berinteraksi secara langsung dengan para siswa dalam bahasa daerah. Jika diadakan di luar kelas, siswa diajak untuk mengalami secara nyata dan langsung ke tempat-tempat budaya atau mengunjungi keluarga/komunitas yang masih memegang adat budaya setempat yang dapat bercerita tentang nilai-nilai kearifan lokal budaya setempat.

Seni budaya khususnya sastra dapat menghasilkan pengetahuan tentang fitur formal dari pengalaman yang berkontribusi pada penjelasan sistematis filsuf tentang alam semesta pikiran (Hegel, 1975, hlm. 1035–6). Dalam setiap kasus, sastra dihargai karena membangkitkan perasaan yang menggantikan gambar untuk pengetahuan diskursif filsafat. Dengan demikian, pembelajaran atau pengenalan bahasa lewat seni budaya tentu akan amat berkontribusi bagi keberlangsungan program ini.

Sejauh ini terdapat dinamika budaya yaitu budaya modern, budaya tradisional dan budaya pop. Istilah yang paling akhir ini seringkali kita berasumsi pada budaya dengan elemen-elemen modern saja, namun asumsi tersebut tidak sepenuhnya benar karena budaya pop di bidang seni dan budaya saat ini dimana unsur-unsur tradisional juga telah menjadi budaya modern yang populer atau pop, semisal lagu-lagu berbahasa daerah seperti Jawa, Bugis, Dayak dengan berbagai macam genre, selama ini telah cukup dikenal. Semisal lagu Jawa “*Layang Dungo Restu*” (LDR) yang diunggah Loro Ati Official setahun lalu telah ditonton oleh 24 juta orang dengan 95 Ribu penyuka dan 7.5 rb komentar serta 580 pelanggan . Lagu ini telah dicover puluhan penyanyi. Lagu berbahasa Bugis Selfi Yamma judul “PPKM” dengan 13 jt penonton dengan 210 pelanggan dan 103 rb komentar. Lagu dangdut remix “*Haning*” berbahasa Dayak Ngaju 17 jt penonton dengan 42,3 pelanggan dan komentar 2.2 rb.

Pembelajaran bahasa daerah sejauh ini tidak hanya melalui lagu, para konten kreator juga menggunakan gaya dan aplikasi lainnya berupa konten komunikasi sehari-hari, nasehat, dengan gaya dan ekspresi yang santai dan kocak . Berikut beberapa youtuber dan instagrammer yang sukses memukau pemirsa dengan tetap menggunakan bahasa daerah sebagai identitas yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia antara lain: (1) Bayu Skak youtuber berbahasa Jawa dengan 2.9 juta pelanggan, (2) Arif Muhammad bahasa Melayu 8 juta pelanggan, (3) Fiksi Aunurrofik, youtuber Bandung, pelestari bahasa Sunda, (4) Elsa Septeani, youtuber Sunda 3 juta viewer, (5) D_Kadoor, youtuber dan instagrammer Bahasa Jawatimuran pelanggan 11 ribu, (6) Nadia Nesa Putri, youtuber Minang pelanggan lebih dari 38 ribu (7) Londo Kampung atau Cak Dave, yotuber bule berbahasa Jawa Timuran dengan 3 juta dan 30 juta penonton, dan (8) Korea Roemit Jan Hansol, youtuber bahasa Jawa khas Malang dengan 2 juta pelanggan.

Jika diamati dengan seksama, sebagian besar pembelajaran bahasa daerah secara tidak langsung semacam ini memiliki pengaruh yang luar biasa bahkan jika dibanding dengan pembelajaran khusus bahasa daerah justru tidak terlalu banyak orang yang yang membukanya. Misalnya, pembelajaran bahasa daerah Jawa yang diunggah di Youtube 6 tahun lalu dan dilihat 65

ribu dengan 3.3700 pelanggan. Demikian juga pembelajaran bahasa daerah lainnya para pemirsa enggan untuk membuka atau menjadi pelanggan informasi. Dengan demikian, menciptakan atau mengembangkan suasana kebahasaan yang baik maka secara alami akan memberikan dampak lama, bahkan cenderung bertahan lama.

Terkait dengan seni budaya, khususnya seni budaya sebagai media untuk merevitalisasi bahasa daerah, hal ini sejalan dengan catatan Aristoteles dan Hegel yang menyatakan bahwa sastra dapat membangkitkan perasaan yang menggantikan gambar untuk pengetahuan diskursif filsafat dan pada sisi lain sastra memberikan petunjuk yang berguna dalam proses mencapai pengetahuan (Rudrum, 2011).

3.2.6. Pembelajaran Berbasis Kreativitas

Pembelajaran berbasis kreativitas adalah pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk menghasilkan karya yang ditulis dalam bahasa daerah. Sebagai contoh, sekolah dapat mengadakan lomba membuat poster atau *banner* yang ditulis dalam bahasa daerah. Misalnya, poster yang berupa ajakan agar siswa menggunakan bahasa daerah “Ayo, kita berbahasa daerah”. Contohnya:

Bahasa Melayu Panai: *Moh la kita babahasa daerah*

Bahasa Batak Angkola: *Keta hita marsaro daerah*

Bahasa Melayu Sorkam: *Mari kita ba babaso kampong*

Bahasa Sasak: *Ngiring tiyang plungguh sami kadu base Sasak*

Kreasi siswa ini kemudian dipasang di sekolah-sekolah sehingga menjadi semacam pengingat atau penyemangat agar siswa bangga dengan kearifan dan budaya lokal di daerah mereka masing-masing.

3.3 Kemitraan

Keberhasilan revitalisasi bahasa dan sastra daerah ini sangat ditentukan oleh kerja sama erat dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap bahasa daerah. Oleh karena itu, perlu ada nota kesepahaman mulai dari hulu hingga hilir antara lain pemerintah daerah, dinas pendidikan, dosen, guru, sastrawan, penyair, seniman, agamawan, tokoh, maupun komunitas

penggerak bahasa dan sastra. Setiap mitra yang tergabung memiliki peran masing-masing. Adapun peran tersebut sebagai berikut.

3.3.1. Pemerintah Daerah

Perevitalisasi Balai Bahasa Provinsi dapat melakukan koordinasi pada tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten/kota bahkan tingkat provinsi dengan dibuatnya peraturan/nota komitmen tentang perlindungan bahasa dan sastra di daerah tersebut. Komitmen ini dapat ditunjukkan dengan pelaksanaan MoU pada tingkat Provinsi atau Tingkat Kabupaten Kota sehingga pada tingkat bawah dapat meneruskan dengan perjanjian kerja sama (PKS).

Menurut undang-undang yang berlaku bahwa kepala daerah bertanggung jawab atas perlindungan bahasa daerah yang berada di daerahnya, pemerintah pusat hanya sebagai fasilitator dalam mendukung proses terlaksananya program revitalisasi ini dengan melalui Badan Bahasa pada tingkat pusat dan Balai/Kantor Bahasa pada tingkat daerah. dalam hal ini sebagai fasilitator seperti memberikan gagasan atau konsep. Hal-hal yang dapat dilakukan terkait dengan pemerintah daerah yang menaungi dinas-dinas dengan berbagai bidang. setingkat Gubernur, Bupati dapat melakukan kebijakannya dalam mendukung pelaksanaan revitalisasi. Kebijakan yang dapat dilakukan yaitu, menganjurkan atau himbauan agar bahasa daerah digunakan di semua dinas pemerintahan di luar situasi acara resmi pemerintahan seperti rapat, seminar, diskusi terpumpun, serah terima jabatan dan kegiatan-kegiatan yang bersifat resmi pemerintahan lainnya.

3.3.2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah mengatur pelaksanaan urusan Pendidikan, sebagai penyelenggara umum di bidang pendidikan. Dengan demikian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan mitra terpenting dalam pelaksanaan program revitalisasi bahasa dan sastra pada. Perevitalisasi dapat melakukan MoU dengan pihak dinas pendidikan dan kebudayaan yang nantinya dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama (PKS).

Hal terpenting yang dapat dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu dengan membantu memasukkan bahasa daerah dalam kurikulum pembelajaran di sekolah yaitu sebagai muatan lokal. Selain itu anak-anak di sekolah dalam proses belajar juga harus menggunakan bahasa daerah, kecuali dalam situasi resmi. Untuk itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim pada kegiatan peluncuran Merdeka Belajar Episode Ketujuh Belas: Revitalisasi Bahasa Daerah secara daring, Selasa (22/2). Ia akan membantu

mendorong pemerintah daerah mewajibkan muatan lokal pelajaran bahasa daerah menjadi muatan lokal, di mana hal ini akan tergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah.

3.3.3 Lembaga Pendidikan

Lembaga Pendidikan memiliki peran yang sangat penting sebagai mitra Badan Bahasa atau Balai Bahasa. Lembaga Pendidikan khususnya di level sekolah dasar, menengah, dan atas merupakan tunas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim pada kegiatan peluncuran Merdeka Belajar Episode Ketujuh Belas: Revitalisasi Bahasa Daerah secara daring, Selasa (22/2). Nadiem menyebutkan untuk melindungi penutur asli bahasa daerah, menurut Menteri Nadiem, strategi terbaik adalah dengan memberi ruang pada penutur jati dalam menggunakan bahasanya.

Salah satu model revitalisasi yang ditawarkan untuk wilayah yang aman, maka cukup dengan pewarisan lewat pembelajaran di sekolah, sementara untuk bahasa daerah yang ketahanan hidupnya tergolong rentan, maka dapat menggunakan model kedua atau B. Pada Model B ini pewarisan tidak hanya difokuskan basis pembelajaran sekolah, namun juga dapat menambah dengan ranah seperti keagamaan, pemerintahan, maupun ranah adat dsr.

Pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah dengan memasukkan pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal di jenjang sekolah dasar, menengah, dan atas. Kebijakan ini tentu harus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dukungan Balai/Kantor Bahasa di wilayah tersebut.

3.3.4 Lembaga Seni dan Budaya

Lembaga seni budaya yang menjadi pusat berkumpulnya para seniman dan budayawan menjadi salah satu mitra yang tepat dalam pelaksanaan program revitalisasi bahasa dan sastra daerah. Seni dan budaya menjadi media yang cukup efektif dalam pelaksanaan program ini. Hampir di seluruh daerah, baik di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten dan kota terdapat organisasi yang menaungi seni dan budaya semisal dewan kesenian daerah yang hampir pasti dapat ditemukan di hampir seluruh kota di Indonesia. Selain itu, hal yang dapat dilakukan oleh perevitalisasi dengan lembaga seni dan budaya ini

3.3.5 Lembaga Keagamaan

Lembaga keagamaan sebagai mitra penting dalam melaksanakan program revitalisasi bahasa dan sastra ini. Tokoh agama selama ini menjadi teladan bagi para jamaah, sehingga apa saja yang menjadi himbauan atau anjuran dari pemimpin agama akan diikuti oleh jamaah atau pengikutnya.

3.3.6 Komunitas

Komunitas juga merupakan mitra penting dalam pelaksanaan untuk melaksanakan program revitalisasi bahasa dan sastra ini. Begitu banyak komunitas yang tersebar di lingkup masyarakat, baik di lingkup perkotaan maupun di pedesaan. Komunitas juga dapat diambil dari yang resmi ataupun tidak resmi. Komunitas sanggar seni budaya, komunitas baca, komunitas peduli lingkungan, komunitas pembrantas PEKAT, dst. Kelompok ini dapat dijadikan sebagai mitra dalam program revitalisasi bahasa dan sastra ini.

3.3.7 Orang Tua/ Wali Murid

Selain apa yang telah dipaparkan di atas, keterlibatan orang tua/ wali murid di ranah keluarga sangatlah berperan penting, karena keluarga merupakan benteng terakhir dalam pemertahan Bahasa. Dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah, setidaknya peran orang tua/wali murid adalah komponen yang sangat penting dan perlu mendapatkan sosialisasi. Jika anak-anak hanya sekadar ‘dihimbau’ saja untuk mau menggunakan bahasa daerah di sekolah, akan tetapi orang tua di rumah tidak membantu untuk melaksanakan program ini, maka upaya revitalisasi akan kurang efektif.

Bentuk kemitraan orang tua/ wali murid melalui forum orang tua dan guru (FOMG). Guru bisa mengimbau kepada orang tua/ wali murid agar menggunakan bahasa daerah di rumah. Pemantauan dapat dilakukan dalam pertemuan tersebut.

3.3.8. Perusahaan Swasta

Perusahaan dapat berperan dalam perlindungan bahasa daerah melalui program CSR. CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan terhadap komunitas dan lingkungannya. Bentuknya kerja sama pelaksanaan perlindungan bahasa, salah satunya pembentukan sanggar atau kursus bahasa daerah.

3.4. Implementasi program

Program revitalisasi bahasa daerah diimplementasikan menjadi tiga langkah besar, yakni survei dan koordinasi, pelatihan dan pembelajaran, dan pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu. Setiap tahapan implementasi program ini akan dijelaskan sebagai berikut.

3.4.1. Survei dan Koordinasi

Survei dan koordinasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perevitalisasi Balai atau Kantor Bahasa selaku pelaksana program. Walaupun keduanya merupakan kegiatan yang bersifat serangkai namun dalam pelaksanaannya bersifat berurutan sebagaimana penjelasan berikut ini.

3.4.1.1 Survei

Survei dilakukan oleh salah satu tim panitia revitalisasi di tempat yang akan dijadikan pelaksanaan program. Survei bahasa sasaran dapat dilakukan dengan dua pola, agar mendapatkan informasi yang utuh dan berjenjang. Survei paling awal dapat dilakukan melalui pengamatan yang tidak langsung melalui informasi media sosial, baik Youtube, Instagram, maupun aplikasi yang lainnya yang terkait dengan informasi calon bahasa sasaran. Yang kedua, survei secara langsung ke tempat calon bahasa sasaran dilakukan sebagai upaya untuk melihat secara langsung situasi dan kondisi kebahasaan yang akan direvitalisasi.

Terdapat beberapa tahapan yang rinci dan teknis yang dilakukan oleh perevitaliasi di calon wilayah bahasa sasaran sebagaimana berikut ini:

1. Perevitaliasi melihat secara langsung calon bahasa sasaran apakah ada kesesuaian antara informasi melalui media sosial yang telah diperoleh sebelumnya dengan fakta yang diamati secara langsung di tempat calon kegiatan revitalisasi bahasa sasaran. Dalam hal ini, tindakan terjun langsung adalah upaya untuk menyesuaikan dengan model apa yang sesuai dengan bahasa sasaran.
2. Perevitaliasi mengamati situasi sosial seperti keagamaan, tempat kerja, rumah tangga, lembaga dan pendidikan serta lembaga pemerintahan setempat sebagai tempat terjadinya peristiwa tutur.
3. Perevitaliasi mengamati budaya tempat penutur bahasa sasaran, seperti bagaimana budaya komunikasi, ekspresi berkesenian, tradisi keseharian masyarakat, norma hukum, serta tradisi yang terdapat pada bahasa sasaran.

3.4.1.2 Koordinasi

Jika survei lebih terfokus pada pengamatan atau identifikasi situasi wilayah dan keadaan masyarakat calon bahasa sasaran, maka dalam tahapan koordinasi ini perevitalisasi memfokuskan pada orang-orang yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan program revitalisasi tersebut. Tahapan yang dilakukan dalam koordinasi ini antara lain.

1. Sebelum salah satu tim panitia revitalisasi turun ke lapangan, yang bersangkutan terlebih dahulu berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan di daerah tersebut, karena secara umum lembaga tersebut memahami tempat kondisi masyarakat tutur calon tempat pelaksanaan program. Dari pihak dinas pendidikan dan kebudayaan tersebut, perevitalisasi memohon untuk menyambungkan dengan orang-orang di wilayah bahasa sasaran yang sesuai dengan yang diperlukan.
2. Perevitalisasi berkoordinasi secara struktural dengan perangkat wilayah bahasa sasaran sebagai bentuk kepatuhan norma umumnya dan tahapan administratif yang umum dilakukan sebelum menjalankan program-program pemerintah.
3. Perevitalisasi berkoordinasi secara kultural dengan pihak-pihak pemangku kepentingan revitalisasi yaitu antara lain pemangku budaya, agama, adat dan tokoh masyarakat di wilayah sasaran bahasa.
4. Perevitalisasi berkoordinasi dengan pihak-pihak atau lembaga terkait dengan orang-orang yang berkompeten yang akan direkrut dalam pelaksanaan revitalisasi bahasa.

3.4.2 Pelatihan dan Pembelajaran

3.4.2.1 Pelatihan

Yang dimaksud dengan pelatihan di sini adalah kegiatan untuk melatih para guru bahasa dan sastra daerah di tingkat SD dan SMP (tingkat provinsi) mengenai materi ajar dan metode pengajaran bahasa dan sastra daerah. Fasilitator pelatihan adalah mereka yang sudah mempunyai pengalaman yang cukup mengenai pengajaran bahasa dan sastra daerah di sekolah-sekolah. Dalam hal ini, dosen-dosen dari prodi pendidikan bahasa dapat dilibatkan untuk memberikan pelatihan mengenai metodologi pengajaran bahasa dan sastra. Diharapkan bahwa pelatihan ini akan menghasilkan guru-guru master yang dapat memberikan pelatihan

kepada guru-guru bahasa daerah MGMP di tingkat kabupaten agar guru-guru tersebut dapat mengajar bahasa dan sastra daerah di sekolah mereka masing-masing.

3.4.2.2 Pembelajaran

Pembelajaran bahasa dan sastra daerah sebagai muatan lokal melibatkan partisipasi aktif antara guru dan siswa didiknya. Proses pembelajaran harus dibuat semenarik mungkin dan harus bervariasi untuk menghindari kebosanan siswa. Perlunya keterlibatan pihak luar untuk mengimplementasikan merdeka belajar harus diterapkan, sehingga pembelajaran tidak harus terjadi di dalam kelas tetapi juga di luar kelas.

3.4.3 Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI)

Pelaksanaan Festival Bahasa Ibu sebagai bagian dari upaya penguatan terhadap benteng kebahasaan sebagai bahasa pertama yang diperoleh seorang anak, bahasa yang dipelajari di rumah dari anggota keluarga yang lebih tua, untuk itu bahasa ibu sebagai bahasa pertama layak untuk dipertahankan, dilestarikan hingga dikembangkan. Untuk mencapai harapan tersebut maka perlu adanya gerakan dengan berbagai macam pola, salah satunya adalah mengadakan Festival Tunas Bahasa Ibu. Untuk lebih semarkanya pelaksanaan tersebut, perlu mencari waktu yang pas salah satunya yaitu dapat dilasanakan bersamaan dengan peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional yang diperingati setiap tanggal 21 Februari. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui balai atau kantor bahasa dapat menyelenggarakan peringatan yang diisi dengan berbagai kegiatan kebahasaan dan kesastraan. Salah satu yang ditampilkan dalam kegiatan itu adalah penampilan Tunas Bahasa Ibu. Penampilan tersebut dapat berupa performa atau unjuk kebolehan dari hasil revitalisasi bahasa dan sastra, seperti berpidato, bermain drama, membaca puisi, atau mendongeng dalam bahasa daerah.

Pelaksanaan festival tunas bahasa ibu dalam peringatan Hari Bahasa Ibu dapat menjadi pendorong bagi para pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan yang terkait dengan bahasa dan sastra. Melalui penampilan para tunas bahasa ibu pula, masyarakat dapat mengetahui betapa kayanya negeri ini dengan berbagai bahasa dan sastra.

Dalam setiap pelaksanaan revitalisasi bahasa dan sastra, diharapkan dapat muncul tunas-tunas bahasa ibu. Mereka itu diharapkan menjadi duta-duta bahasa ibu di daerahnya masing-masing. Melalui mereka bahasa ibu diharapkan dapat bertahan dari kepunahan dan bahkan dapat berkembang.

Pada momentum Hari Bahasa Ibu Internasional yang diperingati setiap tanggal 21 Februari, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Balai atau kantor bahasa dapat menyelenggarakan peringatan yang diisi dengan berbagai kegiatan kebahasaan dan kesastraan. Salah satu yang ditampilkan dalam kegiatan itu adalah penampilan Tunas Bahasa Ibu. Penampilan tersebut dapat berupa performa atau unjuk kebolehan dari hasil revitalisasi bahasa dan sastra, seperti berpidato, bermain drama, membaca puisi, atau mendongeng dalam bahasa daerah.

Penampilan tunas-tunas bahasa ibu dalam peringatan Hari Bahasa Ibu dapat menjadi stimulus bagi para pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan yang terkait dengan bahasa dan sastra. Melalui penampilan para Tunas Bahasa Ibu pula, masyarakat dapat mengetahui betapa kayanya negeri ini dengan berbagai bahasa dan sastra.

Setiap tahun, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyelenggarakan peringatan Hari Bahasa Ibu. Dalam momentum itu, para Tunas Bahasa Ibu hasil revitalisasi di tiap daerah dapat dihadirkan sebagai pengisi Festival Tunas Bahasa Ibu. Pemilihan Tunas Bahasa Ibu dapat ditentukan oleh Balai atau kantor bahasa masing-masing. Demikian pula pengiriman Tunas Bahasa Ibu tersebut dalam acara peringatan Hari Bahasa Ibu di Jakarta diharapkan dapat diupayakan pembiayaan dan fasilitasnya oleh balai atau kantor bahasa masing-masing.

3.5. Pengendalian Mutu: Pengawasan dan Evaluasi

Pengendalian mutu dalam revitalisasi bahasa merupakan suatu sistem kegiatan teknis yang bersifat rutin yang dirancang untuk mengukur dan menilai pelaksanaan pembelajaran dan keberhasilan revitalisasi bahasa. Pengendalian diperlukan untuk menjamin agar kegiatan revitalisasi bahasa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan.

Balai atau Kantor Bahasa beserta dinas pendidikan dapat melakukan pengawasan pengendalian mutu revitalisasi bahasa sejak awal dilakukannya survei dan koordinasi, pelatihan dan pembelajaran, sampai dengan pelaksanaan festival tunas bahasa ibu. Untuk itu diperlukan peran serta aktif dari sumber daya manusia terkait agar setiap kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan terkendali. Setelah itu, evaluasi untuk setiap kegiatan perlu dilakukan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang efisien atau kurang tepat agar dapat dibuat rekomendasi untuk tindak lanjut revitalisasi.

Evaluasi dapat dilakukan terhadap beberapa hal berikut ini.

- 1) Tupoksi setiap pelaksana tugas revitalisasi
 Dalam hal ini, perlu ada evaluasi apakah setiap pelaksana tugas revitalisasi telah menjalankan tupoksinya dengan baik.
- 2) Koordinasi antar unit kerja, instansi, sekolah, dan masyarakat
 Perlu dilakukan evaluasi apakah koordinasi antar pelaksana tugas yang terkait (Kantor/Balai Bahasa, Dinas Pendidikan, Sekolah, Lembaga, Masyarakat/Komunitas) telah terjalin dengan baik dan lancar. Jika terjadi kendala, perlu dicari penyebab kendala tersebut.
- 3) Keberhasilan program
 Dalam hal ini, evaluasi keberhasilan program harus dilakukan secara terukur. Ukuran tingkat keberhasilan harus memasukkan, antara lain, metode yang digunakan, sarana dan prasarana, partisipasi aktif, antusiasme siswa/orang tua/masyarakat, dan bukti penggunaan bahasa daerah secara aktif.

BAB IV

PENUTUP

Indonesia memiliki khazanah kebahasaan yang luarbiasa. Berdasarkan hasil kajian Badan Bahasa, bahwa hingga Oktober 2019, di Indonesia terdapat 718 bahasa. Jumlah tersebut diambil dari total 2.560 bahasa daerah sebagai percontoh dari semua provinsi di seluruh Indonesia. Tidak beda jauh temuan Ethnologue (2020) yang mencatat setidaknya 719 bahasa di Nusantara; 706 diantaranya masih digunakan secara aktif, sedangkan 13 lainnya dianggap sudah punah. Dari 706 bahasa yang masih dituturkan, ada 75 yang berada dalam status hampir punah. Sementara dalam cacatan Steinhauer (1994) memberikan sebuah estimasi bahwa sepersepuluh dari bahasa-bahasa di dunia dapat dijumpai di bumi Indonesia. Ethnologue. Bercermin atas fenomena di atas, bahwa terdapat puluhan bahasa yang rentan punah dan sebagian lainnya telah punah, maka sebab itu pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yaitu dalam Pasal 45 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Merujuk pada fenomena yang berkembang selama ini terkait dengan kepunahan bahasa, maka perlu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Balai atau kantor bahasa melakukan program berupa konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra atas fenomena kebahasaan tersebut

Ikhtiar dengan ragam pendekatan yang selama ini telah dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Balai atau kantor bahasa terkait dengan pelaksanaan program revitalisasi bahasa dan sastra, pelan dan pasti akan menuai hasilnya di masa yang akan datang. Pusat Pengembangan dan Pelindungan telah berperan sesuai dengan tugas fungsinya sebagai supervisi dan kordinasi sementara Balai atau kantor bahasa menjalankan fungsi teknis revitalisasi.

Penyusunan pedoman revitalisasi bahasa dan sastra ini sebagai upaya, agar dalam pelaksanaan program ini terarah, sistematis, dan indikator pencapaiannya jelas. Penyusunan pedoman ini akan terus dikembangkan dan diperbaiki agar pelaksanaan revitalisasi bahasa dan sastra di Indonesia dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh.

Pelaksanaan program revitalisasi tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak yang secara tulus dan semangat dalam membantu terlaksananya para pihak pemegang kepentingan, seperti pemerintah daerah setempat, lembaga adat, tokoh adat dan/atau agama, perguruan tinggi di wilayah kerja masing-masing, dan lembaga atau komunitas yang berkaitan dengan objek revitalisasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Anderbeck, K. 2015. *Portraits of Indonesian language vitality*. ICAL 2012 Proceedings, 2, 19-47.
- Afria, R. (2017). Inventarisasi Kosakata Arkais Sebagai Upaya Penyelamatan dan Perlindungan Bahasa Melayu Kuno di Provinsi Jambi. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 1(2), 254-265. DOI: <https://doi.org/10.22437/titian.v1i2.4232>.
- Arka, I.W. 2013. Language management and minority language maintenance in (eastern) Indonesia: Strategic issues. *Language Documentation and Reservation*, 7, 74-105, <http://hdl.handle.net/10125/4568>.
- Basuningtyas, D.I.A. 2014. *Code switching by three young Indonesian-English bilinguals*. Unpublished Master's Thesis. Atma Jaya Catholic University of Indonesia.
- Berlianty, T., & Balik, A. 2018. Penguatan Eksistensi Bahasa Tana dalam Upaya Perlindungan Hukum Bahasa Daerah sebagai Warisan Budaya Bangsa. *Kertha Patrika*, 40(2), 99-111.
- Bruce, S. (2018). *Sociology: a very short introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Bühmann, D., & Trudell, B. 2008. *Mother tongue matters: Local language as a key to effective learning*. France: UNESCO.
- Crystal, D. (2003). *English as a Global Language, 2th edition*. Oxford: Oxford University.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ethnologue (2020). Indonesia. Diunduh dari ethnologue.com/country/ID.
- Evans, N. 2009. *Dying words: endangered languages and what they have to tell us*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Fishman, J. A. 1991. *Reversing language shift: Theoretical and empirical foundations of assistance to threatened languages (Vol. 76)*. Clevedon: Multilingual Matters.

- Grenoble, L. A dan L. J. Whaley. 2006. *Saving Languages: an Introduction to Language Revitalization*. New York: Cambridge University Press.
- Grenoble, L.A. 2021. *Revitalizing endangered languages : a practical guide* (Eds: Justyna Olko, Julia Sallabank). School of Oriental and African Studies. New York: Cambridge University Press. DOI 10.1017/9781108641142.
- Grimes, B.F. (ed.). 1988. *Ethnologue: Languages of the World*. Dallas, Texas: Summer Institute of Linguistics, Inc.
- Hinton, L., Huss, L. M., & Roche, G. (Eds.). 2018. *The Routledge handbook of language revitalization* (p. 1). New York: Routledge.
- Ibda, H. 2017. Urgensi pemertahanan bahasa ibu di sekolah dasar. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 2(2). DOI: <https://doi.org/10.22515/shahih.v2i2.980>.
- Ibrahim, G. A. 2011. Bahasa terancam punah: Fakta, sebab-musabab, gejala, dan strategi perawatannya. *Linguistik Indonesia*, 29(1), 35-52.
- Ibrahim, G.A. & Mayani, L.A. 2018. Perencanaan bahasa di Indonesia berbasis triglossia. *Linguistik Indonesia*, 36(2), 107-116. DOI: <https://doi.org/10.26499/li.v36i2.77>
- Johnson, A. 2009. The rise of English: The language of globalization in China and the European Union. *Macalester International*, 22, 131-168.
- Johnson, S. 2017. Language is the Garment of Thought. *Interdisciplinary Studies of Literature* Vol. 1, No. 3, Sept., 2017.
- Onishi, N. 2010. As English spreads, Indonesians fear for their language. *The New York Times*, 25 July 2010.
- Riza, H. 2008. *Resources report on languages of Indonesia*. The 6th Workshop on Asian Language Resources.
- Sneddon, J. 2003. Diglossia in Indonesia. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 159(4), Leiden, 519-549.
- Steinhauer, H. 1994. The Indonesian language situation and linguistics: Prospects and possibilities. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 150 Volumes of *Bijdragen; A Backward Glimpse and a Forward Glimpse* 150(4). Leiden, 755- 784.

The Jakarta Post. Local languages at risk of dying out. Saturday, 15 December 2011.

Urip, R. 2015. *Choose to speak English at home: A case study of family language policy of three native Indonesian bilingual families*. Unpublished Master's thesis. Atma Jaya Catholic University of Indonesia.

Jurnal

The codification of native Papuan languages. Journal of Arts and Humanities (JAH) Warami et al., JAH (2020), Vol. 09, No. 10: 40-48.

Media Masa Daring

(<http://scodis.com/for-students/linguarium/language-situation-in-the-world/>).

(<https://www.theatlantic.com/national/archive/2009/11/whats-lost-when-a-language-dies/29886/>).



Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi